



EDISI JULI-SEPTEMBER 2022

GAUNG AMAN

Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat

**Pelaksanaan Mandat Pendampingan
dan Pembelaan Masyarakat Adat**

**Kesiapan Masyarakat Adat
di Jayapura Menyambut KMAN VI**

MENUJU KMAN VI DI PAPUA





Susunan Redaksi

Penanggung Jawab
Sekretaris Jenderal AMAN
Rukka Sombolnggi

Pimpinan Umum
Deputi I Sekjen AMAN
Urusan Organisasi
Eustobio R. Renggi

Pemimpin Redaksi
Nurdiansah Dalidjo

Sekretaris Redaksi
Titi Pangestu

Desain & Tata Letak
Taqi

Koordinator Foto
Giat Perwangsa

Redaksi & Kontributor
Rainny Situmorang, Erasmus Cahyadi,
Mina Susena Setra, Muhammad
Arman, Monang Arifin Saleh, Annas
Radin Syarif, Abdi Akbar, Lesus
Rahmat, Devi Anggraini, Alfa Gumilang,
Chesly Vikario, Apriadi Gunawan,
Khalifa Marasta, Rina Agustine, Kynan
Tegar, Herkulanus Sutomo Manna,
Syamsul Alam, Michelin Sallata, Andri
Sutan Sati, Filo Karundeng

Distribusi
Jeki Angkat & Awaluddin (Dir. OKK)

Alamat Redaksi

Rumah AMAN
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820

(021) 829 7954/837 06282

rumahaman@cbn.net.id

Media Sosial

@AliansiMasyarakatAdatNusantara

@RumahAMAN

@rumah.aman

AMAN - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara -

Podcast Radio Gaung AMAN

www.radio.aman.or.id
"Radio Gaung AMAN"

Portal Berita AMAN.or.id
AMAN.or.id

Foto sampul merupakan panorama pemukiman di Kampung Yoboi, di tengah Danau Sentani dengan latar belakang pemandangan Gunung Cyclops (Dobonsolo / Dafonsoro / Robhong Holo)

	Menuju KMAN VI di Papua	04
	Dedikasi bagi Penjaga Terdepan dari Bumi dan Umat Manusia	06
	Pelaksanaan Mandat Pendampingan & Pembelaan Masyarakat Adat	08
	Masyarakat Adat Kritisi Pidato Kenegaraan Jokowi	11
	Menyentuh yang Tak Terlihat	13
	Tradisi Menangkap Udang Sungai	15
	Seliani, Perempuan Adat Penggerak Sekolah Adat	18
	Pewarisan Pengetahuan Perempuan Adat	21
	Komitmen Pemuda Adat Minahasa & Kawasaran di KMAN VI Papua	24
	Filosofi Lemang pada Ritual Adat Pangku Paliare	27
	Pariwisata Papua Berbenah untuk Kenyamanan Peserta KMAN VI	29
	Kuliner Sagu "Huruwaka Yobe" Ikut Meramaikan KMAN VI	31
	Kesiapan Masyarakat Adat di Jayapura Menyambut KMAN VI	33
	Laporan Keuangan AMAN	38
	Menuju Transformasi CU Randu	42
	KMAN VI	44

Redaksi Gaung AMAN menerima sumbangan atau kontribusi tulisan berupa berita, artikel, feature, dan foto seputar Masyarakat Adat. Kami memprioritaskan kontribusi dari penulis warga adat (komunitas adat anggota AMAN). Silahkan menghubungi sekretaris redaksi kami pada infokom@aman.or.id atau kontak Rumah AMAN untuk mengetahui tema pada edisi selanjutnya maupun pengiriman tulisan dan/atau foto.



Gerai Nusantara
Rumahnya Produk Masyarakat Adat



tenun nusantara

Sebagai rumahnya Masyarakat Adat, Gerai Nusantara menghadirkan produk-produk unggulan yang dihasilkan komunitas anggota AMAN serta berbagai produk inovatif untuk menunjang penampilan etnik kamu.

Berbagai motif tenun Nusantara juga bisa menjadi buah tangan untuk event yang kamu gelar. Dengan sistem *pre-order*, produk *pouch*, *notebook*, *tote bag* maupun *sling bag* unik dari kami tersedia sebagai paket *goodie bag* yang bisa dibagikan ke para peserta. Ditambah dengan adik kandung kami yaitu Nusantara Indigenous Coffee yang akan menjadikan event kamu lebih bersemangat.

Silakan kontak kami untuk *minimum order* dan harga paket-paket yang kami tawarkan, termasuk kopi NIC. Dan dukung terus produk-produk Masyarakat Adat Nusantara ya!

find us

www.gerainusantara.com

Store: Jl. Jend. Sudirman No.15F, RT.01/RW.03, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (on appointment only)



[gerainusantara_aman](https://www.instagram.com/gerainusantara_aman)



0811113237 – Susi



Pada Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), kita telah menegaskan peran perempuan adat yang sangat esensial. Perempuan adat tidak saja dibekali, tetapi juga mempraktikkan secara teguh pengetahuan Masyarakat Adat secara turun-temurun dalam pengelolaan sumber daya alam, perawatan lingkungan, hutan, pertanian, dan sumber penghidupan untuk menjaga ketahanan hidup Masyarakat Adat di atas wilayah adatnya. Sayangnya, peran perempuan adat di Indonesia hingga saat ini masih dipandang sebelah mata, bahkan cenderung diabaikan dan didiskriminasi.

Akar persoalan struktural yang dihadapi oleh Masyarakat Adat adalah kebijakan pembangunan negara yang mengeksklusi hak Masyarakat Adat, khususnya hak perempuan adat. Berbagai instrumen hukum yang lahir justru digunakan untuk melegitimasi penghancuran Masyarakat Adat atas ruang hidupnya, salah satunya UU Cipta Kerja - kita sebut sebagai UU Cilaka - yang secara nyata memandang lapangan pekerjaan hanya dapat diciptakan oleh korporasi. Faktanya, ketika pandemi Covid-19 menghantam, perusahaan mem-PHK 3,5 juta orang pekerja. Sementara itu, situasi berbeda ditunjukkan oleh berbagai komunitas Masyarakat Adat yang masih berdaulat atas wilayah adatnya, di mana kita bertahan dan turut menopang sumber pangan bagi masyarakat perkotaan.

Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-77, RUU Masyarakat Adat yang diamanatkan konstitusi, belum juga ada. Negara belum hadir di tengah-tengah Masyarakat Adat. Banyak masalah yang kita alami sebagai akibat dari 77 tahun pengabaian atas hak konstitusional, seperti pemiskinan, pembunuhan, konflik, kriminalisasi, krisis identitas, dan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada memburuknya kondisi Masyarakat Adat di Nusantara. Itu seharusnya menjadi momentum refleksi bagi pengurus negara untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk perubahan hukum dan kebijakan yang menjadi penyebab pelanggaran hak Masyarakat Adat. Langkah nyata yang seharusnya sejak lama dilakukan oleh pemerintah dan DPR, adalah mengesahkan RUU Masyarakat Adat. UU itu merupakan jalan

MENUJU KMAN VI DI PAPUA



untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Masyarakat Adat, termasuk hak perempuan adat yang terbukti mampu merawat dan mewariskan pengetahuan kita untuk ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan sumber pangan nasional.

Saat ini, kita bersiap-siap menuju KMAN VI di Wilayah Adat Tabi di Jayapura, Papua dan memastikan para utusan Masyarakat Adat hadir untuk kita merumuskan strategi dan arah organisasi ke depan. Kita bergotong-royong dan bermusyawarah untuk pemilihan calon pemimpin Masyarakat Adat ke depan untuk Sekjen AMAN selanjutnya. Itu adalah praktik demokrasi yang kita jalankan di organisasi yang berhadapan dengan demokrasi liberal *one man one vote*, tapi tidak di AMAN. Doakan mudah-mudahan semua bakal calon tergerak dan terpanggil untuk melanjutkan perjuangan Masyarakat Adat dan menjadi nahkoda dari organisasi ini.

AMAN menyerukan kepada seluruh Masyarakat Adat di Nusantara, secara khusus anggota, pengurus, organisasi sayap, dan badan otonom untuk segera menyiapkan dan merapatkan barisan menyambut KMAN VI dengan penuh suka cita. Perjuangan masih panjang, kita masih jauh dari cita-cita kita bersama, namun kita tidak menyerah. AMAN juga mengajak kepada seluruh jaringan Masyarakat Sipil untuk terlibat dan berpartisipasi pada KMAN VI untuk melakukan konsolidasi gerakan Masyarakat Adat Nusantara dalam mewujudkan Masyarakat Adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya!

Rukka Sombolinggi

Sekjen AMAN





KONGRES MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KE-ENAM (KMAN VI)

Wilayah Adat Tabi, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua.

24-28 Oktober 2022

*Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat
untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia
yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis*



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
& Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura



Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) diperingati dan dirayakan pada 9 Agustus setiap tahunnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Masyarakat Adat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tahun ini, kita memiliki tema "**Peran Perempuan Adat dalam Merawat dan Mentransmisikan Pengetahuan Tradisional.**" Hal itu merupakan penegasan pengakuan dunia internasional terhadap peran perempuan adat dalam menjaga Ibu Bumi sekaligus merefleksikan posisi sentral perempuan adat dalam memastikan eksistensi Masyarakat Adat dan keberlanjutan pengetahuan Masyarakat Adat dari generasi ke generasi.

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menyampaikan pidato yang tidak hanya memberikan penghargaan bagi para perempuan adat, tetapi juga menyadarkan kita semua akan situasi krisis maupun kedudukan Masyarakat Adat, terutama perempuan adat, sebagai garda paling depan untuk menjaga kelangsungan bumi dan umat manusia yang berkehidupan di dalamnya. Berikut ini adalah uraian dari pidato Rukka Sombolinggi pada malam perayaan HIMAS di Rumah AMAN, Kota Bogor.

Dedikasi bagi Penjaga Terdepan dari Bumi dan Umat Manusia

oleh : Rukka Sombolinggi



Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi memberikan Pidato pada perayaan HIMAS di Rumah AMAN Bogor.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN

HIMAS adalah hari yang penting untuk kita merayakan gerakan perlawanan Masyarakat Adat di dunia karena kita semua menolak punah. Kita melawan kolonialisme atau penjajahan atas Masyarakat Adat.

Saat ini, kita sedang berhadapan dengan berbagai krisis. Salah satu krisis yang ada di depan kita, adalah krisis iklim. Ini semua disebabkan karena tindakan kita yang berasal dari cara pandang yang menghancurkan alam dan bersikap tidak adil pada sesama. Akan tetapi, di tengah-tengah penghancuran itu, terdapat 80 persen biodiversitas yang ada di muka bumi ini, ada di wilayah-wilayah adat. Kita patut bersyukur kepada Masyarakat Adat! Di tengah penghancuran, kita masih menyelamatkan 80 persen keanekaragaman hayati di dunia.



Mengacu pada data PEREMPUAN AMAN (2022), 70 persen aktivitas perempuan adat adalah berladang tradisional. Perempuan adat telah menyediakan pangan bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa peran perempuan adat tidak direkognisi secara adil. Itu terbukti tidak hanya pada ketidakadilan dalam kebijakan, namun juga tidak diikutsertakannya perempuan adat dalam agenda-agenda pembangun, mulai dari desa sampai tingkat nasional, bahkan global. Sebagai contoh, perempuan adat masih belum mendapatkan tempat di dalam agenda-agenda G20, sebuah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Tentu saja, itu menunjukkan ketidaksadaran pada relasi penting perempuan adat yang memiliki peran strategis di dalam perang melawan perubahan iklim sebagai salah satu agenda utama G20. Padahal, - dengan mempertimbangkan perempuan adat yang penting dan sentral itu - diskursus dan kebijakan perubahan iklim pada tataran internasional itu seharusnya menegaskan kesetaraan pelibatan perempuan dan laki-laki dalam kebijakan iklim yang berkeadilan dan responsif gender.

Jadi, apa yang kita rayakan? Mengapa hari ini dikhususkan untuk kita mengakui dan memberikan penghargaan kepada perempuan adat? Karena, terbukti dari 80 persen keanekaragaman hayati dan budaya yang ada itu, semua tidak lepas dari keberadaan dan peran penting perempuan adat. Semua ekosistem yang masih baik itu, ada karena perempuan adat masih memainkan peran penting dalam merawat pengetahuan, menjaga bumi, dan meneruskan pengetahuan itu dari generasi ke generasi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi keluarga, kampung, serta seluruh umat manusia. Untuk itulah, mari kita sampaikan salam hormat dan semangat untuk para perempuan adat.

Solusi keluar dari krisis tak lepas dan tak akan terjadi jika kita tidak mengubah cara kita menempatkan dan memandang perempuan adat yang ikut menjaga 80 persen dari keanekaragaman yang tersisa di bumi. Di organisasi ini, kita patut bangga sebab dari berdirinya hingga kini, para perempuan diberi tempat. Tapi, itu belum cukup. Masih banyak cara pandang dan tindakan yang perlu kita perbarui. Cara kita memandang perempuan adat di kampung dan organisasi, masih perlu kita perkuat dengan membersihkan diri dari berbagai ideologi yang memang tidak adil bagi perempuan, di mana kita telah menyingkirkan perempuan adat dari proses pengambilan keputusan dan ruang hidupnya. Ketika kita berhasil melakukan dekolonisasi pemikiran atau cara pandang terhadap perempuan, maka itulah kita Masyarakat Adat. Ketika kita masih menempatkan perempuan adat sebagai kelas dua, maka sebenarnya kita belum punya landasan moral untuk meminta negara berubah. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri, dari wilayah adat, dari kampung dan dari organisasi. Dengan begitu, kita akan mungkin bergandeng tangan mengatakan bahwa kita akan memimpin dunia dari krisis yang terjadi saat ini. Tantangan begitu besar. Dan, tantangan itu hanya bisa kita hadapi dengan melakukan perubahan dari cara pandang dan cara pikir kita yang akan menjadi tindakan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perempuan adat yang ada di wilayah adat dan selamat dan hormat kepada seluruh pengurus PEREMPUAN AMAN bersama Ketua Umum PEREMPUAN AMAN. Kita tidak hanya menjaga pengetahuan, tapi juga menjaga seluruh umat manusia. Pengetahuan itu pun masih banyak yang dikangkangi oleh pihak lain. Kita perlu urai hegemoni pengetahuan! Mengembalikan pengetahuan ke tempat dan pemilik sesungguhnya. Lantas, memastikan pengetahuan perempuan adat yang sudah banyak di-*capture* lembaga penelitian itu, digunakan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Tidak hanya digunakan untuk hamba atau budak perusak alam, perusahaan, dan pemerintah yang menindas. Saatnya kita rebut kembali pengetahuan itu dan kembalikan pada pemiliknya dan gunakan untuk wujudkan tujuan bangsa ini untuk mencerdaskan dan keadilan sosial.

Kita mereklaim kembali ilmu pengetahuan leluhur. Saya ingin bangga dengan buatan saya (sebagai Masyarakat Adat) dan tidak tergantung dengan buatan orang lain yang bisa jadi didapatkan dengan mencuri ilmu dan pengetahuan kita. Kita sebarkan dan praktikkan dan lestarikan pengetahuan perempuan adat. Jadi, melawan kapitalisme dimulai dari tindakan kecil, termasuk menghargai dan meneruskan ilmu pengetahuan yang banyak dirawat oleh para perempuan adat.



Pelaksanaan Mandat Pendampingan dan Pembelaan Masyarakat Adat

oleh : Surti Handayani *

Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) adalah organisasi sayap AMAN berbentuk perkumpulan yang keanggotaannya terdiri dari advokat dan/atau ahli hukum yang peduli dan berkomitmen pada kerja pembelaan dan pemajuan Masyarakat Adat. Pembentukan PPMAN dilaksanakan melalui Konferensi Nasional atau KONFERNAS I Para Advokat Masyarakat Adat Nusantara pada 25-27 September 2013 di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. KONFERNAS yang difasilitasi penuh oleh AMAN itu merupakan bagian dari upaya untuk membentuk organisasi sayap dan badan otonom yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pengurus Nasional PPMAN terdiri dari tujuh orang dewan pengawas dan para badan pelaksana yang dipimpin oleh seorang ketua umum yang berkantor di Sekretariat Nasional (Seknas) PPMAN.

Anggota PPMAN bersifat perseorangan, terbuka, dan sukarela. Hingga saat ini, mereka yang telah ditetapkan secara sah sebagai anggota berjumlah 126 orang per Desember 2021 dan tersebar di 13 wilayah maupun provinsi di Indonesia. Sementara itu, terdapat juga 148 orang paralegal PPMAN yang dihasilkan berdasarkan dari proses pelatihan.



* Penulis adalah manajer monitoring & pendokumentasian di Seknas PPMAN.

Kunjungan ke lokasi pengrusakan rumah warga Masyarakat Adat penghayat Laroma di Desa Tondei Dua, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Sumber foto: Dokumentasi PPMAN.



Berdasarkan mandat dari KONFERNAS III di Banyuwangi, Jawa Timur pada Desember 2021, PPMAN berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan pembelaan, baik litigasi maupun non-litigasi kepada Masyarakat Adat anggota AMAN. Selain pendampingan hukum, PPMAN pula berkomitmen untuk mencetak pengacara-pengacara yang berasal dari komunitas Masyarakat Adat dan tim paralegal yang akan membantu kerja-kerja pengacara anggota PPMAN dalam melakukan pembelaan terhadap Masyarakat Adat yang hingga kini masih mengalami tindakan represi, intimidasi, dan kriminalisasi struktural karena mempertahankan wilayah adatnya dari industri ekstraktif serta terampasnya hak Masyarakat Adat dari terbitnya peraturan perundang-undangan yang tidak melibatkan Masyarakat Adat dalam proses pembentukannya secara bermakna atau penuh maupun tidak mematuhi prinsip *Free, Prior, Informed and Consent* (FPIC).

Pasca-KONFERNAS, PPMAN telah melakukan berbagai proses pembelaan kepada Masyarakat Adat anggota AMAN serta mendukung gerakan Masyarakat Adat, di mana banyak dari Masyarakat Adat mendapat tindakan represif dari aparat penegak hukum. Sejak Desember 2021 hingga Agustus 2022, PPMAN telah menerima tujuh belas kasus yang memiliki latar belakang berbeda, baik itu kriminalisasi maupun perampasan wilayah adat. Kasus-kasus tersebut membutuhkan perhatian khusus dari PPMAN sebagai organisasi sayap AMAN yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan pembelaan Masyarakat Adat.

Tindakan Represif & Kriminalisasi Masyarakat Adat

Pada Juli hingga September 2022, PPMAN fokus menghadapi beberapa kasus, salah satunya Masyarakat Adat Sihaporas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang terancam kehilangan wilayah adatnya dan mendapatkan represi oleh oknum perusahaan dan aparat kepolisian pada Maret lalu. Hal yang serupa juga terjadi lagi pada Juni 2022.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Seknas PPMAN merekomendasikan ahli pidana yang dapat memberikan kesaksian saat sidang pra-peradilan. Akan tetapi, hakim memutus gugatan ditolak.

Pada 15 Juni 2022, terjadi penghadangan 20 orang dari Polres Simalungun yang mengambil foto Posko Perlawanan Lamtoras. Penghadangan tersebut dilakukan oleh beberapa orang perempuan adat yang hingga saat ini berjuang melawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) untuk memperjuangkan hak atas wilayah adat.



PPMAN bersama keluarga korban di Desa Tondei Dua.
Sumber foto: Dokumentasi PPMAN.



Selain itu, terjadi kasus yang menimpa Masyarakat Adat Malesung di Desa Tondei Dua, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Berawal dari perusakan rumah keluarga Sual Tombuku, penghayat *Lalang Rondor Malesung* (Laroma). Alasan yang diutarakan adalah bahwa penghayat Laroma dianggap atau dituduh sebagai “pengikut gereja setan.” Ada juga warga yang mengutarakan Laroma itu sesat.

Laporan itu langsung diterima oleh Ketua Umum PPMAN Syamsul Alam Agus. Secara kelembagaan, Laroma sudah mendapat surat dari desa setempat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), bahkan tercatat secara legal dan terdaftar di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Belakangan, PPMAN juga menerima informasi terkait situasi Masyarakat Adat di Tobelo Dalam di Waci, Maba Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara, yang dikriminalisasi dengan tuduhan pembunuhan pada 2019 dan sudah ada putusan kasasi pada 2021. Seknas PPMAN telah melakukan komunikasi dengan Koordinator PPMAN Region Maluku serta anggota kami yang terdekat dari lokasi kejadian.

Salah satu anggota PPMAN yang berada di Maluku Utara, akan memandu kasus tersebut sekaligus menjalin komunikasi secara intens. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan membentuk tim bantuan hukum dan tim respons kemanusiaan karena kasus tersebut berdampak pada keluarga terdakwa.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh PPMAN sejak Desember 2021 hingga Agustus 2022, ada tujuh belas kasus yang ditangani karena adanya tindakan represif, intimidasi, dan pengkriminalisasian secara struktural yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun negara, termasuk aparat penegak hukum, preman yang dibayar perusahaan, dan penjaga keamanan perusahaan.

Mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di wilayah adat, PPMAN mengambil langkah-langkah konkret dan mengedepankan inklusivitas dalam pendampingan dan pembelaan Masyarakat Adat.



Kunjungan PPMAN ke Lapas Ternate untuk memberikan advokasi & dukungan moral pada 6 Orang Masyarakat Adat Tobelo Dalam yang di vonis hingga Hukuman Penjara Seumur Hidup karena dituduh melakukan pembunuhan berencana.

Sumber foto: Dokumentasi PPMAN.



Masyarakat Adat Kritisi Pidato Kenegaraan Jokowi

oleh : Syahliwan, * Muhammad Hajazi, * dan Apriadi Gunawan

Sakarani menggerutu saat melihat penampilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat milik Masyarakat Adat pada Sidang Tahunan MPR/DPR pada 16 Agustus 2022. Ia merasa penggunaan pakaian adat tersebut tidak sejalan dengan harapan Masyarakat Adat selama ini.

Tokoh adat dari Balai Paninggalan Datu Nini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan itu menilai bahwa pakaian adat yang dikenakan Jokowi, masih sebatas simbol dan tidak mencerminkan kesungguhan dalam memperhatikan atau membela kepentingan Masyarakat Adat.

Sakarani mengutarakan, dalam pidato menyambut Hari Ulang Tahun RI ke-77, disebutkan bahwa meski telah banyak Undang-Undang (UU) yang disahkan, namun Jokowi tidak menyinggung sedikit pun perihal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Padahal, lanjut Sakarani, UU itu sudah lama dinantikan oleh Masyarakat Adat. Menurutnya, ketiadaan UU Masyarakat Adat membuat Masyarakat Adat saat ini belum merdeka.

"Usia kemerdekaan Indonesia sudah mencapai 77 tahun. Namun, secara hakikat, belum sepenuhnya dirasakan oleh Masyarakat Adat. Kami merdeka jika RUU Masyarakat Adat disahkan," katanya usai menyaksikan pidato Jokowi yang disiarkan langsung di televisi.

Sakarani menyatakan bahwa di tengah perayaan Kemerdekaan RI, Masyarakat Adat masih dihantui rasa takut dalam menjaga wilayah adat, khususnya di HST, di mana Masyarakat Adat masih harus berjuang mempertahankan wilayah adatnya dari perampasan. Ia menuturkan, saat ini HST menjadi incaran para investor, termasuk perusahaan pertambangan dan perkebunan sawit. Sakarani menyebut, meski sekarang wilayah adat mereka masih relatif bersih dari kegiatan pertambangan dan perkebunan, tapi ia dan warga lain belum bisa memastikan bahwa kondisi akan tetap sama dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, berbagai wilayah adat di kabupaten-kabupaten tetangga, satu per satu habis digarap oleh para investor pertambangan dan perkebunan sawit.

* Penulis adalah jurnalis rakyat dari Kalimantan Selatan (Syahliwan) dan Nusa Tenggara Barat (Muhammad Hajazi).



Presiden Joko Widodo ketika mengundang Masyarakat Adat untuk bertemu.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



"Infonya, tidak lama lagi investor akan menggarap wilayah adat kami. Ini ancaman buat Masyarakat Adat di HST," katanya.

Mirdianto, tokoh adat dari Komunitas Masyarakat Adat Papagaran di HST, mengungkapkan pula rasa kecewanya terhadap isi pidato Jokowi. Ia menyatakan bahwa Jokowi tidak peka terhadap penderitaan Masyarakat Adat. Itu terbukti dalam pidatonya yang enggan menyinggung UU Masyarakat Adat.

"Walaupun secara tidak langsung, Presiden Jokowi menyatakan perlindungan hukum dan pemenuhan hak sipil dan hak kelompok marjinal, harus dijamin. Akan tetapi, makna dari perkataan Jokowi tersebut masih tidak memastikan nasib UU Masyarakat Adat," tandasnya.

Sementara itu, Rohadi dari AMAN Lombok Timur juga mengkritisi pakaian adat yang dipakai Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan sebagai simbol belaka karena materi pidatonya tidak menyinggung substansi RUU Masyarakat Adat. Sebaliknya, Jokowi justru lebih banyak berbicara penawaran investasi kepada pihak asing di wilayah adat, seperti sebutan Kalimantan yang diistilahkan dengan "green investasi." Menurutnya, gagasan yang ditawarkan presiden, bertolak belakang dengan bagian awal dari pidatonya sendiri yang menyebut kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan memperhatikan lingkungan.

"Presiden terkesan inkonsisten," kata Rohadi pada Kamis (18/8/2022).

Pada kesempatan yang sama, Rohadi mengkritik soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang digagas oleh Jokowi. Ia menegaskan, jika negara tidak mampu membangun IKN karena biayanya terlalu besar, sebaiknya jangan dibangun dulu.

"Jangan memaksakan sesuatu yang nantinya bisa menyengsarakan masyarakat. Ini berbahaya," ungkap Rohadi.

Ia menambahkan dengan bilang, betapa naifnya negara jika 80 persen pembangunan IKN itu diserahkan kepada pihak swasta, multiplier effect (efek lanjutan) yang diharapkan malah akan menguntungkan segelintir orang saja.

"Ini tidak baik karena dampaknya tidak ada bagi masyarakat sekitar, bahkan Masyarakat Adat yang ada di IKN akan semakin termarginalkan," kata Rohadi.

Dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR/DPR yang dilaksanakan sehari sebelum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 itu, Jokowi juga membahas beberapa hal penting terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dihubungkan dengan berbagai hal, mulai dari surplus APBN, pengendalian inflasi, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan produktivitas pangan, kepercayaan internasional, capaian vaksinasi, hingga pembangunan IKN. Tetapi, di balik itu semua, kondisi Masyarakat Adat kian menghadapi tekanan bertubi-tubi.



Pembacaan Resolusi Masyarakat Adat PPU atas Rencana Pembangunan IKN.
Sumber foto: Dokumentasi PPMAN.



Menyentuh yang Tak Terlihat: Catatan Perjuangan Pengakuan Hak-hak Perempuan Adat

Oleh Arimbi Heroepoetri *

"Di forum internasional, biasanya istilah "*rural women*" (perempuan perdesaan) dan "*Indigenous women*" (perempuan adat) dapat dipakai keduanya."

Saya tercenung membaca pernyataan yang dikeluarkan oleh perempuan yang pernah menjadi Anggota DPR dan gigih membela hak-hak perempuan itu. Pernyataannya jelas menunjukkan bahwa ia berjarak, jika tidak ingin dikatakan, jauh dari isu perempuan adat.

Kenyataan itu melecut bahwa kerja-kerja untuk memperkenalkan isu perempuan adat kepada publik, para pengambil keputusan, maupun kelompok *mainstream* (arus utama) di masyarakat, masihlah jauh dan panjang. Kebanyakan orang memandang Masyarakat Adat sebagai orang di pelosok dengan gaya yang unik, jarang sekali yang melihat - apalagi mengakui - Masyarakat Adat sebagai satu kesatuan komunitas yang memiliki pengetahuan, ekspresi, dan wilayah hidup. Yang terakhir ini, soal wilayah hidup malah jauh sekali dari pemahaman. Untuk apa Masyarakat Adat menguasai lahan sampai ratusan hektar? Demikian mereka selalu mempertanyakan.

Di tengah kondisi itu, kerabunan untuk melihat peran, posisi, kerentanan, dan keistimewaan perempuan adat, akan semakin pekat, baik dalam konteks perempuan adat di dalam lingkaran Masyarakat Adat, kelompok masyarakat *mainstream*, maupun ketika berhadapan dengan negara.

Riset yang dilakukan oleh PEREMPUAN AMAN (2020) berhasil memetakan setidaknya ada lima permasalahan yang dihadapi perempuan adat dan menghalangi mereka menikmati pemenuhan haknya, yaitu:

1. Perempuan adat tidak terlibat dalam keputusan, baik di tingkat adat maupun pemerintah

Kebanyakan anggota komunitas Masyarakat Adat berpendapat bahwa peran perempuan adat adalah sebagai anggota komunitas saja. Sangat sedikit yang merasa bahwa perempuan adat dapat berperan sebagai pemimpin komunitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam komunitas Masyarakat Adat, posisi perempuan secara umum tidak diperhitungkan, sehingga suara dan kepentingannya, sejak di tingkat komunitasnya, rentan untuk diabaikan. Kondisi itu juga mempengaruhi keterampilan perempuan adat untuk mengungkapkan pandangannya dan berbicara di depan publik. Dalam berbagai pertemuan, perempuan adat cenderung untuk diam. Demikian juga, ketika undangan dari pemerintah untuk menghadiri berbagai pertemuan, undangan kerap ditujukan kepada ketua adat yang mayoritas laki-laki.

2. Pembagian kerja secara seksual

Pembagian kerja secara seksual, pada prinsipnya menempatkan laki-laki dan perempuan dalam peran gendernya di masyarakat. (Arif Budiman, 1982) Dalam pengerjaan ladang misalnya, perempuan dan laki-laki kerap bekerja sama, namun laki-laki akan mengambil peran bekerja yang lebih mengurus tenaga, seperti memotong dan mengangkut. Sementara perempuan, bekerja dalam penanaman dan pemeliharaan, pekerjaan yang dianggap lebih ringan. Demikian juga dalam upacara adat, perempuan mengerjakan upacara adat yang dipandang sebagai kodratnya, seperti upacara adat untuk melahirkan dan perkawinan. Namun, kebanyakan perempuan tidak dapat menjadi pemimpin adat karena anggapan bahwa laki-laki adalah pemimpin.



Testimoni Ibu Elizabeth, perempuan adat Maanyalint, Kalimantan Barat, berkata, "Perempuan menganyam bambu karena lebih mudah mengambil bambu, dekat dengan rumah. Tapi, sekarang sudah mulai sulit mengambil bambu. Harus berjalan kaki lama baru dapat karena banyak bambu yang dibabat. Kalau laki-laki menyirat rotan karena ambil rotan perlu berjalan ke hutan. Sebagai perempuan, tentunya pekerjaan rumah tangga masuk sebagai tugas pokok, jadi beban kerja saya berlipat ganda."

3. Penghargaan yang rendah akan pengetahuan perempuan adat

Perempuan adat mengenali jenis-jenis tumbuhan untuk dibuat kerajinan (tikar, bakul, tas, dan lainnya) atau makanan sebagai bagian dari upacara adat. Dalam berbagai ritual adat, kebanyakan beban untuk menyediakan bahan-bahan ritual, ada di tangan perempuan adat. Terkait ilmu perbintangan atau kearifan lokal, - soal kapan waktunya menanam atau jenis tanaman apa yang ditanam - perempuan sangat aktif bertanya karena ada hari-hari yang tidak cocok untuk menanam.

Pengetahuan perempuan adat akan bahan-bahan ritual adat, pangan, obat-obatan, pewarna kain, dan lainnya, sebenarnya menjaga keanekaragaman hayati di suatu wilayah adat. Ketiadaan pengakuan dan penghargaan kepada pengetahuan perempuan adat tersebut, menjadi salah satu faktor kerusakan alam.

4. Laki-laki sebagai kepala keluarga

Cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, sebenarnya merugikan perempuan adat. Walaupun sama-sama bekerja mengelola rumah tangga dan lahan, namun pengambilan keputusan kebanyakan di tangan laki-laki (suami). Akibatnya, kebutuhan dan keahlian perempuan tidak dihargai secara layak.

5. Peluruhan budaya adat

Masyarakat Adat masih menggunakan bahasa ibu sehari-hari, terutama ketika mereka berkomunikasi secara internal. Namun, kita ketahui bersama bahwa bahasa ibu tidak diajarkan dalam pendidikan formal.

Kondisi itu akan mengantarkan Masyarakat Adat secara lambat laun kehilangan bahasa ibunya (*mother language*). Kehilangan bahasa ibu adalah kehilangan salah satu identitas Masyarakat Adat sekaligus menghilangkan peran penting perempuan adat karena pengajaran budaya, termasuk bahasa, adalah peran khas perempuan adat dalam komunitasnya.

Penutup: Pengetahuan, hak kolektif, dan wilayah hidup sebagai *enabling condition* keberlangsungan hidup perempuan adat

Setidaknya, ada tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian khusus dalam persoalan perempuan adat, yaitu pengetahuan (perempuan) adat dalam pengobatan, bahasa, dan pengelolaan pangan berkelanjutan; hak kolektif perempuan adat dalam teknologi dan inovasi; serta wilayah hidup yang memandang lingkungan dalam satu kesatuan ekosistem antara flora-fauna, lahan, dan air, tidak terpisahkan. Juga tata kuasa dan tata kelolanya yang berada di tangan Masyarakat Adat.

Ketiga hal tersebut adalah kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Hilangnya salah satu unsur di atas, akan membahayakan eksistensi perempuan adat dan juga keutuhan komunitas Masyarakat Adat.

Keberadaan perempuan adat akan tetap (di-)kabur(-kan) selama pemahaman yang utuh mengenai Masyarakat Adat dan perempuan adat, belum terjadi. Karena itu, sosialisasi secara terus-menerus mengenai eksistensi perempuan adat, perlu dilakukan. Itu ditujukan kepada Masyarakat Adat itu sendiri, masyarakat pada umumnya, dan para pengambil kebijakan.

* Penulis adalah periset senior pada debtWATCH Indonesia dan Tenaga Ahli MPR.



Tradisi Menangkap Udang Sungai

oleh : Yeryana *

Setiap tahun pada Mei sampai Juli, Masyarakat Adat Dayak Maayan yang tersebar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, khususnya yang berada di Kabupaten Barito Timur (Bartim) dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah, memasuki siklus pasca-panen padi. Berbagai macam ritual dilakukan pada bulan-bulan tersebut sebagai wujud rasa syukur. Dan, di saat tangkai-tangkai padi usai panen itu kami biarkan membusuk dan mengering di ladang, para perempuan adat mulai melakukan aktivitas keluar ladang secara sementara, seperti memancing dan mencari ikan. Di musim kemarau, kondisi sungai-sungai kami memiliki kedalaman yang relatif sedang, bahkan ada sungai yang airnya surut, sehingga itu memudahkan kami menangkap ikan dengan alat pancing (*mintan*), dengan tangan secara langsung (*igagap*), dan dengan tombak (*nariuk*).

Bagi kami perempuan adat dari Masyarakat Adat Dayak Maayan, momen itu menjadi peluang untuk memanfaatkan pengetahuan sekaligus wilayah kelola perempuan adat. Kami mengeksplorasi sungai setelah menyelesaikan pekerjaan di ladang. Itu merupakan saat yang kami tunggu untuk menikmati keseruan mencari udang sungai di kampung kami yang meski berukuran kecil, namun terasa nikmat tiada duanya.

Tidak seperti udang tambak atau laut, udang sungai di wilayah adat kami punya karakter yang berbeda. Kata orang, udang sungai tidak punya kadar kolesterol setinggi udang lain, jadi relatif aman untuk dikonsumsi siapa saja. Kami pun punya cara untuk mengolahnya yang tidak selalu harus digoreng. Melalui tulisan ini, saya mau berbagi cerita tentang proses atau teknik perempuan adat menangkap udang di sungai.

Ada dua teknik umum yang kami praktikkan dalam menangkap udang sungai, yaitu *nikep* dan *ngame*. *Nikep* adalah menangguk udang di siang hari, biasanya kami lakukan di atas jam 12 siang. Alat yang kami gunakan adalah alat tangkap atau *tangguk* tradisional yang terbuat dari rotan. Selain itu, kami juga punya tradisi maupun teknik menangkap udang pada malam hari, biasanya dimulai pada jam enam sore ke atas. Itulah yang kami sebut *ngame*. *Ngame* adalah bentuk kata kerja dari "kame" dalam bahasa adat kami dan itu diterjemahkan sebagai hantu atau roh halus. Jadi, *ngame* adalah menghantui. Selain tangguk rotan, kami juga menggunakan serokan yang terbuat dari kain dalam *ngame*.

* Penulis adalah perempuan adat dari Masyarakat Adat Dayak Maayan dan PEREMPUAN AMAN PHD Bartim.





Ada cerita menarik di balik *ngame*. Kisah itu dituturkan dari generasi ke generasi. Dari zaman eyang buyut saya, penyebutan *ngame* telah dikenal. Dahulu, ada seorang ibu yang mempunyai anak kecil di suku kami. Ia ingin mencari udang di malam hari. Tetapi, anaknya yang masih kecil merengek ingin ikut. Ibu itu tak ingin anaknya ikut sebab aktivitas turun ke sungai pada malam hari, dapat berbahaya bagi balita. Anak-anak berisiko digigit ular dan masuk angin. Maka, agar si anak tidak ikut, ibunya mengatakan kalau ia hendak pergi *ngame* atau menghantui udang-udang di sungai. Alasan tersebut efektif. Itu membuat anaknya berhenti merengek untuk ikut. Sejak itu, para perempuan adat mengikuti dengan bilang hendak *ngame* kepada anak-anaknya. Saya ingat ketika saya masih berusia tiga sampai 10 tahun, saya suka merengek dan meminta untuk ikut ibu saya ketika ia keluar malam hari untuk *ngame*. Ketika ibu saya bilang kalau ia akan *ngame*, saya terbayang itu adalah hal yang menakutkan. Maka, saya segera masuk kamar untuk berlindung di balik kelambu dan tidur.

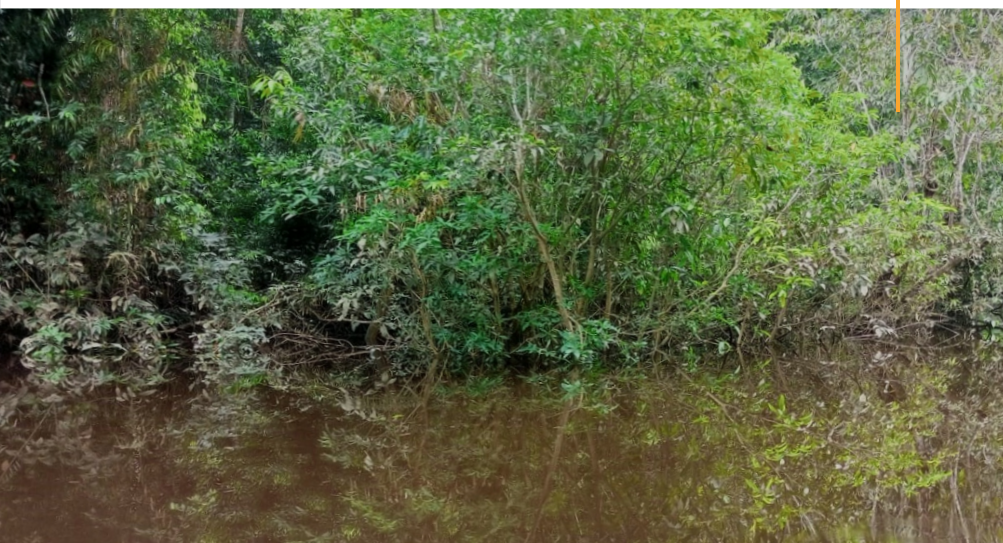
Jika dibandingkan mana yang lebih menjanjikan antara *nikep* dan *ngame*, *ngame* memang jarang mengecewakan. Pada periode Mei-Juni itu, *ngame* hampir selalu memberikan hasil tangkapan memuaskan. Tentu saja, asalkan sungai kami tidak dirusak dan dicemari.

Udang sungai di Kalimantan Tengah memiliki warna hitam dengan ukuran maksimal sejempol orang dewasa dan rasa yang manis gurih ketika dimasak. Keberadaan mereka melimpah di sungai. Mereka juga mudah ditemukan di sela-sela daun maupun akar serabut pohon-pohon yang berada di pinggiran sungai.

Dulu, saat belum ada senter, kami menggunakan obor bambu untuk *ngame*. Tetapi, saat menangkap udang di sungai, senter tidak boleh disorotkan secara langsung ke arah udang-udang di sungai. Mereka akan kabur dan masuk ke bagian dalam sungai untuk menjauhi cahaya. Maka, saat menaruh senter di kepala, kami sebisa mungkin tidak menyorot mereka. Saya sering gemas saat menyenter area yang menjadi titik yang hendak *ditangguk*. Biasanya, udang-udang memancarkan kerlap-kerlip berwarna merah muda dari mata mereka ketika terkena cahaya. Dalam *ngame*, kami bisa menggunakan perahu kayu atau mesin (*kalotok* atau *ces*) untuk menjelajah sungai. Seringkali, kami tak segan untuk terjun langsung ke sungai dan *menangguk* di sepanjang aliran sungai. Sebelum jam 10 malam, air sungai terasa dingin di permukaan, tapi di bagian bawah atau dalamnya justru hangat. Lalu, memasuki jam 10 malam ke atas, air sungai secara keseluruhan berhawa amat dingin.

Memantau kondisi cuaca sebelum pergi menangkap udang di malam hari, amatlah penting. Jika terjadi hujan pada sorenya, ada baiknya kami tidak berangkat karena saat kondisi seperti itu, udang-udang akan bersembunyi, sehingga tangkapan tidak akan berhasil.

Di Barito Timur, khususnya Komunitas Masyarakat Adat Tamiang Layang yang menjadi tempat saya tinggal, Sungai Sirau sudah tidak seproduktif dulu. Sungai telah mulai tercemar limbah dari aktivitas penambangan batu bara, sehingga tidak lagi menghasilkan udang maupun ikan air tawar yang semelimpah dulu. Maka, jika kami ingin memancing dan mencari udang di sungai, kini kami harus berkendara dengan jarak kurang lebih 18 kilometer ke Komunitas Masyarakat Adat Patai dan Harara yang sungainya masih dalam kondisi baik dan memiliki kelimpahan ikan maupun udang. Sungai Patai masih dijaga dengan baik oleh Masyarakat Adat di sana sebagai sumber



Sungai tempat para perempuan adat mencari ikan dan udang.
Sumber foto: Dokumentasi PEREMPUAN AMAN.



protein utama. Meski begitu, belakangan banyak orang dari luar kampung yang datang dengan berpura-pura memancing dengan cara tradisional. Lalu, saat tidak terpantau warga Masyarakat Adat Patai, mereka melakukan tindakan tidak terpuji, seperti menyentrum ikan dan menangkap udang dengan racun. Jika sudah begitu, biasanya dalam rentang seminggu ke depan, kami tidak akan bisa memperoleh ikan atau udang. Jadi, meski udang-udang sungai kami ada yang diperjualbelikan di pasar, kami enggan untuk membeli karena takut udang-udang itu diperoleh dengan cara tak baik. Udang yang ditangkap dengan racun, dapat memberikan risiko diare, gatal-gatal, dan keracunan, bahkan kematian bagi ibu yang baru melahirkan (*nifas*) atau kami menyebutnya dengan *tawen*.

Nikep dan *ngame* adalah tradisi perempuan adat dari Masyarakat Adat Dayak Maayan yang erat korelasinya dengan kesehatan ekosistem sungai di wilayah adat kami. Seandainya pohon-pohon maupun hutan di sepanjang sungai kami digunduli, maka dapat dipastikan kalau udang sungai akan punah karena mereka bersarang pada dedaunan dan akar-akar serabut pohon yang tumbuh di sepanjang pinggiran sungai.

Saat ini, ada banyak sungai yang rusak seiring dengan kehadiran berbagai pertambangan dan perkebunan sawit. Kerusakan pada sungai berdampak pada sulitnya kami memperoleh ikan maupun udang. Selain itu, harga ikan dan makanan lain di pasar juga kian mahal. Saat ini, harga ikan sungai lebih dari Rp. 50 ribu per kilogram, sedangkan harga daging babi mencapai Rp. 65 ribu per kilogram. Padahal, dulu saat hutan masih asri, kami tak pernah membeli makanan-makanan itu. Kini, pertambangan dan perkebunan sawit telah masuk hingga ke dalam hutan dan mendekati gunung-gunung. Sementara pemandangan sepanjang jalan kota kabupaten dan penghubung antar-kecamatan yang dulu rindang, berubah gersang dan dipadati perkebunan sawit.



Di tengah kemajuan zaman dan dinamika pembangunan yang semakin menggerus eksistensi kami sebagai Masyarakat Adat maupun cara hidup kami yang lekat dengan alam, hutan, dan sungai, ada rasa lara dan kecemasan yang tak berujung bagi kami memikirkan generasi selanjutnya. Saat *nikep* dan *ngame* kelak punah, maka kelezatan menyantap udang pun bisa jadi tinggal cerita. Itu adalah pertanda kerusakan yang sudah kian parah atas sungai-sungai kami. Lalu, apa kabar kesehatan kami sebagai perempuan adat dan anak-anak kami? Sungai adalah sumber makanan, khususnya protein.

Jika kami sakit, biasanya kami pun pergi ke hutan untuk mencari dan meramu obat-obatan. Tapi, jika sungai dan hutan rusak, bahkan tiada, kami berangsur-angsur juga akan punah.

Kami berharap para pemimpin dan pemangku kebijakan dapat melindungi hak kami sebagai Masyarakat Adat dan warga negara yang melahirkan generasi penerus bangsa. Berikan kami jaminan hidup berkelanjutan! Berikan kami perlindungan pada sumber hidup kami: hutan, sungai, dan alam di wilayah adat kami! Saya bertanya-tanya, untuk apa teknologi canggih dan bangunan megah jika manusia sakit karena sumber kehidupan dan pangan sehat dipunahkan? Padahal, pilihan dan cara hidup kami menentukan kesempatan hidup generasi selanjutnya: punah atau berlanjut.

Seliani, Perempuan Adat Penggerak Sekolah Adat

oleh : Nurdiyansah Dalidjo

AMAN telah memiliki 90 sekolah adat (berdasarkan data per 31 Agustus 2022) yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah sekolah adat itu terus bertambah. Selain pemuda adat, perempuan adat turut menginisiasi dan mengelola sebagian dari sekolah adat yang telah berdiri tersebut.

Kami berbincang dengan Seliani, seorang perempuan adat dari Komunitas Masyarakat Adat Dayeq Jumetn Tuwayatn di Kampung Sembuan, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, tentang pengalaman kelompok perempuan adat dalam menggagas sekolah adat. Di sana, ia bersama para perempuan adat anggota PEREMPUAN AMAN Lou Bawe, aktif mengelola Sekolah Adat Dayeq Lewangan secara kolektif.

"Saat ini, kondisi perempuan adat di komunitas Masyarakat Adat kami sehari-hari hidup dari hasil hutan dan ladang. Kami menanam padi di ladang lahan kering. Ada juga yang menanam sayur, *menores* (menyadap) karet, serta berternak babi dan ayam yang juga kami gunakan dalam ritual adat," ucap Seliani bercerita tentang kondisi kampungnya yang berada di perbukitan. Ia bilang kalau di wilayah adatnya juga terdapat sejumlah perusahaan tambang dan kayu. "Perempuan adat belum menyadari apa yang akan terjadi ke depan dengan perusahaan-perusahaan yang kelak merampas wilayah adat."

Di tengah ancaman dari keberadaan perusahaan maupun aktivitasnya, Masyarakat Adat di Sembuan masih menjaga dan mengelola wilayah adat yang tersisa. Para perempuan adat memiliki wilayah kelolanya untuk bercocok tanam. Pengetahuan dalam bercocok tanam itu diwarisi kepada perempuan adat. Selain itu, berbagai ritual adat, termasuk Belian untuk menyembuhkan orang sakit, serta seni dan budaya, khususnya bermacam tarian dan lagu, juga menjadi bagian dari pengetahuan yang diturunkan pada perempuan adat.

Seliani berbagi cerita tentang berbagai tarian dan lagu daerah yang diajarkan di sekolah adat kepada para peserta didiknya, termasuk Tari Gantar.



"Di sekolah adat, kami buat (mengkreasikan) Tari Gantar dengan gerakan menanam padi. Ada gerakan seperti menanam, menebas, dan memanen padi. Kami beri judul tarian itu dengan istilah Tarian Menanam Padi dan ada juga Tarian Menangkap Ikan. Kita hubungkan dengan kegiatan berdasarkan pengetahuan agar anak-anak mengingat kembali cara mempertahankan hidup di wilayah adat," ucap Ketua Pengurus Harian Daerah (PHD) PEREMPUAN AMAN Lou Bawe itu.

Menurutnya, perempuan adat adalah kunci dan garda depan dari keberlangsungan seni dan budaya Masyarakat Adat.

"Perempuan adat juga berperan dalam keluarga," tambahnya. "Perempuan adat lebih sering bertemu dengan anak-anak, jadi pewarisan terjadi di keluarga dan diperkuat dengan sekolah adat."



Sekolah Adat Dayeq Lewangan awalnya didirikan oleh Ratnaty yang sekaligus menjadi Kepala Adat Kampung Sembuan. Gagasan terhadap pendirian sekolah adat, papar Seliani, muncul usai Ratnaty mengikuti pelatihan mengenai pendidikan adat yang diselenggarakan AMAN. Ia kemudian berbagi kapasitas yang didapatnya kepada kelompok perempuan adat lain di kampung, termasuk Seliani. Kini, selain Sekolah Adat Dayeq Lewangan yang dikelola oleh enam orang perempuan adat dengan jumlah peserta didik mencapai 60 orang siswa SD dan SMP, PEREMPUAN AMAN Lou Bawe juga melahirkan beberapa sekolah adat di kampung-kampung tetangga. Sehingga, total terdapat empat sekolah adat di Kutai Barat.

Bicara mengenai keberlangsungan seni dan budaya, Seliani mengungkapkan keprihatinannya mengenai anak-anak adat yang semakin berjarak dengan bahasa ibu dan wilayah adat. Tetapi, di kampungnya ia merasa punya harapan besar ketika para peserta didik menunjukkan antusiasme mengikuti pembelajaran di sekolah adat.

"Sekoah adat kami berbeda," ungkapnya ketika ditanya tentang kekhasan corak maupun tata kelola sekolah adat dibandingkan sekolah formal atau modern. "Kami punya slogan bahwa semua orang itu guru dan alam raya itu sekolah. Kita belajar di luar (ruang kelas). Kita bisa pergi ke hutan, kebun buah.... Kita ajak anak-anak belajar mengenal tumbuhan dan manfaatnya dengan bahasa kami serta cara menjaganya agar tetap lestari. Kami ajak anak-anak ke danau untuk memancing dengan alat tangkap ikan tradisional yang dibuat dari anyaman. Pengelolaan sekolah adat sifatnya sukarela. Ketika perempuan adat ada waktu, kami berkumpul seminggu dua kali di balai adat. Lalu, kami akan sepakati kegiatan di tiap pekannya: memancing, menyulam, menyanyi, atau menari. Kegiatannya berpindah-pindah. Kita belajar di alam bebas."

Lalu, bagaimana dengan tantangan yang dihadapi oleh Seliani dan perempuan adat dalam mengelola sekolah adat? Tentu saja, itu melampaui persoalan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, di mana ia seringkali harus pergi ke lereng gunung, bahkan pergi ke ibu kota kabupaten yang berjarak sekitar 50 kilometer dari kampung, hanya untuk mendapatkan sinyal telepon dan internet.



Siswa Sekolah Adat berpose di plang Sekolah Adat Dayeq Lewangan.
Dokumentasi PEREMPUAN AMAN



“Tantangannya cukup banyak dan tidak mudah bagi kami untuk bergerak menjadi relawan di sekolah adat,” jawabnya. Ia melanjutkan dengan mengutarakan dua tantangan yang dihadapi, “Pertama, perbedaan pendapat dan pandangan dari sesama relawan atau tokoh adat. Ada dari mereka menganggap pengetahuan kami belum mumpuni untuk mengajarkan adat istiadat. Dulu, memang ada aturan baku bagaimana seorang harus berguru tentang adat. Tak semua boleh mengajarkan ke semua orang. Kedua, keterbatasan pengetahuan kami tentang budaya yang ada dan itu harus digali sebab tak banyak lagi yang dilakukan dan hampir hilang. Kami harus kumpulkan informasi dan bertanya.”

Seliani sampai harus berguru kembali pada tetua adat dan menjalani ritual adat untuk bisa mengukuhkan diri sebagai pengajar di sekolah adat. Ia menegaskan bahwa yang diajarkan kepada anak-anak adat adalah pemahaman agar mereka tidak melupakan identitas diri sebagai Masyarakat Adat serta membangun keterhubungan dengan lingkungan yang menjadi bagian wilayah adat.

Seliani juga mengaku membutuhkan peralatan pendukung dan kapasitas untuk bisa tetap berdaya dalam mewarisi pengetahuan leluhur melalui sekolah adat. Salah satu yang menurutnya dibutuhkan di kampung, adalah pelatihan untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan publik (*public speaking*).

“Dengan berdirinya sekolah adat, mulai ada prospek baik untuk pewarisan seni dan budaya. Saya senang ada sekolah adat karena ada wadah untuk berbagi pengetahuan dan lebih dekat dengan anak-anak. Anak-anak berminat untuk belajar budaya serta mengenal wilayah adat dan diri sebagai Masyarakat Adat,” ucapnya. Ia mengaku pernah menganggap adat istiadat dan budayanya sendiri sebagai hal yang ketinggalan zaman. “Saya malu kalau harus pergi ikut ritual adat dan saya dikasih *jampi-jampi*. Tetapi, ketika saya diajak Ibu Kepala Adat untuk aktif dan ikut kegiatan AMAN, saya mulai menyadari siapa saya sebagai perempuan adat.”

Seliani punya rencana ke depan untuk sekolah adat. Ia bilang, ada banyak permintaan dari komunitas Masyarakat Adat lain agar mereka membantu pendirian sekolah adat.

Siswa sekolah Adat Dayeq Lewangan, di Kampung Sembuan, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN



Perbincangan dengan Seliani pada artikel ini, juga dapat didengarkan melalui Podcast Radio Gaung AMAN pada Program Bincang Masyarakat Adat: “Pewarisan Pengetahuan Masyarakat Adat.”



Pewarisan Pengetahuan Perempuan Adat untuk Keberlangsungan Kehidupan

oleh : Nurdiansah Dalidjo

Kita telah mendengar banyak kisah maupun melihat berbagai potret atas peran perempuan adat dalam bermacam hal di wilayah adatnya. Peran tersebut terhubung dengan fungsi perempuan adat sebagai subsisten di dalam keluarga maupun komunitas Masyarakat Adat, mulai dari urusan air, pangan, sandang, perkakas rumah tangga, dan lain-lain yang seringkali dianggap remeh, namun sesungguhnya amatlah pokok dan politis. Tentu saja, peran itu melekat pada perempuan adat bukan sebagai hal yang *taken for granted* (diterima atau diberi begitu saja). Dengan seluruh kemampuan personal dan kolektifnya - pikiran, tenaga, perasaan, dan pengalaman - dalam beradaptasi dan berinovasi, perempuan adat menegaskan upaya dalam mewarisi dan merawat pengetahuan dari generasi ke generasi.

Namun, apakah kita kerap luput melihat itu sebagai hal yang penting dan strategis? Jika pun tidak, kita perlu merenungkan kesadaran lain bahwa untuk melakukan itu, perempuan adat menghadapi tantangan yang berlipat ganda dan penuh ancaman. Dalam beberapa tahun terakhir, keadaan diperparah dengan hadirnya beragam peraturan dan kebijakan yang semakin mereduksi peran perempuan adat. Di saat yang bersamaan, itu juga menjauhkan perempuan adat dari wilayah kelolanya.

Pengetahuan dan Peran dalam Situasi Menantang

Di Kampong Menteng dan Secanggang, Deli Serdang, Sumatera Utara, perempuan adat di Masyarakat Adat Rakyat Penunggu misalnya, membangun kebun sayur secara kolektif di atas tanah tandus di wilayah adat yang pernah dirampas dan dijadikan perkebunan monokultur. Kebun yang diinisiasi dan dikelola oleh kelompok perempuan adat itu menuai hasil dan manfaat ketika pandemi menghantam. Meski begitu, panen yang kini melimpah, tidaklah dilalui dengan mudah.



Meiliana Yumi, seorang perempuan adat, pernah menuturkan kisah bagaimana perempuan adat di sana harus berjuang keras untuk bisa kembali merawat dan mengembangkan pengetahuan kolektif yang diwarisi pada mereka dalam berkebun. Ia bilang kalau mengorganisasi dan membangun kebun kolektif itu tidak gampang bagi perempuan adat. Ada berbagai penolakan yang awalnya muncul dari komunitas Masyarakat Adatnya sendiri, termasuk nilai patriarki yang mengakar kuat di antara lelaki. Yumi dan para perempuan adat terus bergerak dengan memanfaatkan segala celah untuk bisa bersuara di dalam ruang pengambilan keputusan. Mereka memberanikan diri untuk menegaskan peran perempuan adat yang pernah ikut memperjuangkan wilayah adat.



"Saat wilayah adat kami masih dikuasai PTPN II, kami berani dan siap untuk mempertahankan wilayah adat. Kami yang terdepan karena kalau laki-laki yang di depan, itu akan berdarah-darah (penuh kekerasan). Maka, kami langsung turun pertahankan wilayah adat kami, sementara yang laki-laki melakukan advokasi dan negosiasi bersama pemerintah," ungkap Yumi. Para perempuan adat kemudian ikut mengawal proses pembuatan kebijakan pengakuan hak Masyarakat Adat.

Situasi menantang yang dialami Yumi, juga dihadapi berbagai perempuan adat di seluruh Nusantara dalam mempertahankan pewarisan pengetahuan bersama dengan wilayah kelola perempuan adat, mulai dari perjuangan perempuan adat membentengi wilayah adat dari perampasan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Tano Batak, Sumatera Utara; menjaga hutan sagu di Papua; menolak lokasi pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur; melindungi kebun bambu, bakau, dan rotan (bahan anyaman) dari perkebunan sawit dan proyek infrastruktur di Paser, Kalimantan Timur; dan sebagainya.

Apa yang dilakukan perempuan adat atas pewarisan pengetahuan dan peran tersebut, merupakan upaya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas wilayah adat serta dukungan terhadap subsisten yang berdampak langsung pada kedaulatan pangan dan ekonomi Masyarakat Adat. Akan tetapi, hal yang bertentangan justru terus-menerus terjadi. Dan tekanan-tekanan itu mengondisikan perempuan adat sebagai target.

PEREMPUAN AMAN mencatat bahwa perubahan lingkungan di wilayah adat, termasuk wilayah kelola perempuan adat di dalamnya, telah mencapai 98 persen. Secara linier, perubahan drastis dan masif tersebut mengakibatkan degradasi dan pelemahan yang konsisten dan kontinyu terhadap pengetahuan perempuan adat, di mana kini hanya tersisa 64 persen pengetahuan perempuan adat yang masih diwariskan dari para tetua.

"Perempuan adat selalu mencoba melihat bagaimana pengetahuan itu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi," ucap Ketua Umum PEREMPUAN AMAN Devi Anggraini pada pidato perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) pada 9 Agustus 2022. "Dengan seluruh hatinya, perempuan adat berupaya memastikan kemandirian kehidupan bisa dibangun oleh perempuan adat dari wilayah adat dengan pengetahuannya. Tapi, kalau kita melihat data bahwa lingkungan di wilayah adat sudah mengalami perubahan, artinya wilayah-wilayah produktif telah berubah menjadi konsesi: tambang, perkebunan, infrastruktur, konsevasi, transmigrasi, bahkan rezim perubahan iklim yang merampas wilayah adat dan wilayah kelola perempuan adat."



Menurut Devi, situasi yang mengancam itu, bukan hanya mempertaruhkan identitas Bhinneka Tunggal Ika, tapi juga menghancurkan generasi muda karena tak lagi mengenal adat istiadat dan menghilangkan keberagaman bangsa.

"Kami ingin mengajak kita semua untuk melihat lagi betapa mudah kita mengatakan bahwa perempuan adat ini memainkan peran yang penting dalam pengelolaan SDA. Tapi, pernahkah kita membicarakan dan melihat tantangan yang dihadapi perempuan adat dalam situasi saat ini? Peran yang harus dimainkan untuk memastikan bahwa ketahanan hidup komunitas Masyarakat Adat masih bisa berlangsung, tapi secara ironis proyek dengan beragam nama itu masuk wilayah adat dan mengambil seluruh kemandirian perempuan adat dan Masyarakat Adat untuk berdaulat atas wilayah adat dan kehidupannya."

Uraian yang diutarakan Devi itu mengacu pada peran penting dan strategis perempuan adat yang kerap masih dianggap selayaknya pekerjaan harian yang tidak penting dan tidak strategis. Melalui pidato itu dan penegasan upaya PEREMPUAN AMAN dalam menghadirkan visibilitas perempuan adat melalui data dan penelitian, Ketua Umum PEREMPUAN AMAN menekankan bahwa bukanlah sesuatu yang mudah bagi perempuan adat untuk berjuang menunjukkan diri hadir di dalam proses yang bisa memastikan kepentingan perempuan adat atas wilayah adatnya.

"Dalam situasi ini, yang tak terhindarkan adalah kehancuran yang ada di depan mata jika kita tidak mau melihat peran-peran ini bisa terus dipertahankan dan berlangsung. Mari, kita bersama-sama bergandeng tangan memperjuangkan bahwa pengetahuan masih terus bisa kita praktikkan dan berlangsung di wilayah adat untuk menghidupi kita dan memastikan kedaulatan, kemandirian, dan kemartabatan Masyarakat Adat tetap terjamin."

Adalah penting bagi kita untuk kemudian menaruh hormat sekaligus mengupayakan dukungan bagi perempuan adat dalam mewariskan, merawat, dan mengembangkan pengetahuan di dalam situasi yang menantang dan penuh ancaman saat ini.





Komitmen Pemuda Adat Minahasa & Kawasaran di KMAN VI Papua

oleh : Filo Gratiadeo Karundeng *

Memasuki bulan September 2022, para pemuda adat di Minahasa mulai menggelar latihan *Kawasaran*, sebuah tarian yang menggambarkan semangat bertempur, berjuang, dan menjadi pelindung bagi tou (manusia) serta tanah tempat berpijak. Latihan difokuskan untuk menghadapi Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) di Wilayah Adat Tabi, Papua pada 24-30 Oktober 2022.

"Sejak awal September 2022, para anggota BPAN (Barisan Pemuda Adat Nusantara) di Minahasa yang menyiapkan diri untuk hadir di KMAN VI, mulai berkumpul untuk latihan *Kawasaran*. Jadi, teman-teman perempuan dan laki-laki yang siap untuk ke Papua dan menjadi bagian dari *tumpukan Kawasaran*, rutin berkumpul untuk latihan," kata Belarmino Lapong, Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Pengurus Daerah (PD) Tomohon pada 10 September 2022 lalu.

Berbagai persiapan telah dilakukan para pemuda adat dari Minahasa untuk memastikan diri agar bisa hadir dan berpartisipasi dalam KMAN VI, termasuk rutin mengumpulkan dana mandiri untuk membiayai perjalanan dan pendukungnya.

"Ini sebenarnya bagian dari persiapan para pemuda adat di Minahasa ke Papua. Semangat *Kawasaran* menjadi motivasi bagi kami untuk bergerak bersama secara maksimal," ujar Belarmino.

Latihan *Kawasaran* dikoordinasikan oleh BPAN PD Tomohon. Anggota BPAN dari komunitas Masyarakat Adat lain yang siap bermain bersama, juga datang secara rutin ke Tomohon untuk latihan.

"Ada juga teman-teman BPAN pengurus kampung dari wilayah lain yang bermain bersama kami. Tapi, karena inisiatif dilakukan BPAN Tomohon, kami yang dipercayakan untuk mengoordinasikan teman-teman lain. Ada yang jauh dari Tomohon, tapi semangat dan komitmen membuat kita bisa berkumpul secara rutin untuk latihan di Tomohon," tandasnya. Menurut Belarmino, ada motivasi khusus bagi para pemuda adat untuk hadir dan menjadi bagian dari KMAN. "Niat kami bukan hanya hadir di KMAN VI, tapi menjadi bagian dari musyawarah untuk menentukan langkah dan nasib Masyarakat Adat di Nusantara. Kami ingin turut memberikan kontribusi pemikiran, terlibat mengonsolidasikan gerakan Masyarakat Adat, merumuskan langkah, dan menyatakan komitmen untuk menjalankan komitmen bersama itu," ungkapnya.



Para pemuda adat melakukan latihan *Kawasaran*. | Sumber foto: Dokumentasi BPAN.



"Kami gembira bisa menampilkan seni tradisi warisan leluhur kami di KMAN VI. Kami juga siap membantu panitia untuk menyukseskan kongres ini. Ini perayaan dan musyawarah kita, jadi ini tanggung jawab kita bersama seluruh Masyarakat Adat di Nusantara," tegas Belarmino.

Penggerak Sekolah Adat

Memainkan tarian *Kawasaran* bukan hal baru bagi para pemuda adat di Minahasa, apalagi yang tergabung dalam BPAN. Itu tradisi turun-temurun yang diajarkan di kampung-kampung. Hanya saja, setiap tarian *Kawasaran* di tiap *wanua* atau kampung, unik dan dapat berbeda.

"Tarian *Kawasaran* ada di seluruh Minahasa sebab ini tradisi warisan leluhur sejak lampau yang tetap dipelihara. Cuma di tiap *wanua* atau *roong* itu memang berbeda. Bukan hanya soal atribut dan gerakan, tapi juga syair, karena setiap kampung punya syair masing-masing," kata Josua Wajong, penggerak dan pengajar *Kawasaran* di Sekolah Adat Tou Mu'ung Wuaya. Ia menjelaskan lebih lanjut, "*Kawasaran* itu bagian dari ekspresi dalam sebuah *foso* atau ritus. Di Minahasa, tiap kampung sejak dahulu memiliki ritus-ritus yang sama, tapi - dalam praktik - tata caranya ada yang berbeda. Doa-doa yang dilantunkan juga ada yang berbeda karena konteks di mana mereka hidup itu memang berbeda. Itu mempengaruhi *Kawasaran* di Minahasa hingga hari ini."

Walau demikian, *Kawasaran* pemuda adat Minahasa yang dipersiapkan untuk hadir dan menjadi bagian dari KMAN VI, tidak ada kesulitan dalam latihan karena yang akan bermain adalah penggerak sekolah adat yang rutin belajar dan mengajar tarian *Kawasaran*.

"Beruntung, kami itu penggerak Sekolah Adat Tou Mu'ung Wuaya dan Sekolah Adat Waraney Wuaya. Di sekolah adat, kami sering belajar dan mengajar *Kawasaran* sesuai dengan tradisi di tempat kami. Namun, kami juga sering ada kelas bersama untuk *sharing* tentang pengetahuan seni tradisi *Kawasaran* dari berbagai kampung. Jadi, sekolah adat kami ada juga jadwal belajar bersama," ujarnya.

Jadwal belajar *Kawasaran* yang dilakukan secara intens oleh Sekolah Adat Tou Mu'ung Wuaya dan Sekolah Adat Waraney Wuaya, membuat para pemuda adat yang akan tampil di KMAN VI akan dapat menyesuaikan dan memainkan syair yang disepakati.

"Itu mengapa kami tidak ada kesulitan untuk bermain bersama walau dari kampung yang berbeda. Kami hanya perlu kesepakatan atas syair dari kampung mana yang akan kita pakai. Di sekolah adat, kami sering belajar banyak syair. Untuk KMAN VI, kita sepakat memainkan satu syair yang ada di Wilayah Adat Tombulu," sebut Josua.

Tradisi Kelung Um Banua

Kawasaran adalah tradisi yang penting dan sakral, maka belajar *Kawasaran* bagi *tou* Minahasa bukan sekadar mempelajari seni tradisi, tapi juga upaya memelihara pengetahuan leluhur. Pengetahuan untuk memelihara hubungan yang baik antara manusia dan *semananou* (makhluk lain yang terlihat maupun yang tidak terlihat), *kayobaan* (alam semesta), dan *Empung Kasuruan Wangko* (Sang Khalik).

Di Tanah Minahasa, tradisi budaya digempur dengan berbagai diskriminasi dan stigma. Para tetua yang masih tetap setia menjaga tradisi pengetahuan para leluhur pun kini harus berjuang keras. Para pemuda adalah tumpuan penting bagi perjuangan.

"Tradisi budaya terus digerus modernisasi. Belum lagi stigma sesat oleh agama-agama besar. *Kawasaran* termasuk yang dianggap sesat. Maka, perjuangan menjaga tradisi budaya dan seni tradisi itu sangat berat. Walau demikian, kami tetap yakin, pengetahuan leluhur yang kami hidupi, masih akan tetap hidup. Para pemuda adat di BPAN akan turut berada di depan dalam komitmen dan perjuangan ini," kata Rafael Taroreh, pemuda adat penggerak Sekolah Adat Waraney Wuaya.

Belajar *Kawasaran* dan tetap terus menampilkannya di depan publik, adalah bagian dari upaya untuk menjaga tradisi sakral itu tetap hidup.

"Bagi kami, menjaga *Kawasaran* adalah bagian dari menjaga tradisi leluhur. Proses belajar di sekolah adat juga meyakinkan kita bahwa ada banyak pengetahuan tentang kehidupan yang tersimpan dalam tradisi *Kawasaran*, salah satunya tradisi *kelung um banua*, tradisi menjadi pelindung negeri di Minahasa," jelas Rafael.



Tradisi *kelung um banua* adalah bagian penting bagi kehidupan *tou* Minahasa, maka itu harus tetap dijaga. "Tradisi *kelung um banua* adalah tradisi menjaga negeri, menjaga ruang hidup. Termasuk menjaga *tou* dan keberlangsungan hidup. Maka, menjaga tradisi Kawasaran berarti menjaga pengetahuan untuk melindungi *tou* dan tanah tempat kita berpijak," ujarnya.

KMAN VI menjadi salah satu pemantik bagi para pemuda adat di Minahasa untuk tetap sadar dalam menjaga dan mewariskan tradisi pengetahuan leluhur.

"Momen menghadapi KMAN juga memberi semangat bagi kita untuk belajar bersama *Kawasaran*. Kita kembali dapat motivasi belajar dan kita akan mendapat ruang yang besar untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa tradisi ini masih hidup. Saat latihan bersama, kami kembali mengingat bahwa kita punya tugas penting dari leluhur untuk menjaga tanah bagi anak-cucu kami. Di AMAN, kita punya semangat yang sama. Semangat itulah yang akan kami bawa dari Tanah Minahasa ke Tanah Papua," terang Rafael.

"Kami memilih Minawanua, sebuah kampung tua Tomohon sebagai tempat latihan. Sebab, kami ingin spirit leluhur dahulu bisa tetap merasuki kami. Kami juga ingin mereka menjadi bagian dari langkah dan perjuangan kami hari ini," tegas Rafael.

Di KMAN 2022, para pemuda adat dari Minahasa siap menghibur melalui Kawasaran, tapi juga siap mengekspresikan tarian sakral itu sebagai doa dan komitmen seluruh Masyarakat Adat di Nusantara.

"Hari ini, ada *Kawasaran* yang dimainkan dan dipentaskan dalam berbagai acara. Bagi kami, tantangan terbesar adalah bagaimana tetap memelihara *Kawasaran* agar tetap dipelajari dan dipahami maknanya, salah satunya lewat sekolah adat. Di KMAN, kami tidak hanya akan memainkan *Kawasaran* pertunjukan, tapi - jika ada ruang dan *Opo Empung* (Tuhan Yang Baik) berkenan - mengekspresikan *Kawasaran* ritus. Kita akan memainkannya sebagai doa untuk Tanah Papua, doa untuk Masyarakat Adat di Nusantara dan sebagai wujud komitmen dalam perjuangan bersama seluruh Masyarakat Adat di Nusantara dalam menjaga wilayah adatnya. *I Yayat U Santi!*"



Kawasaran. | Sumber foto: Dokumentasi BPAN.

* Penulis adalah Dewan Pemuda Adat Nusantara Region Sulawesi di BPAN dan pemuda adat dari Minahasa, Sulawesi Utara.



Filosofi Lemang pada Ritual Adat Pangku Paliare

Oleh Endang Setiawan *

Proses pembakaran lemang oleh perempuan adat.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Masyarakat Adat Semende Muara Dua Ulu Nasal di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu, berduyun-duyun membawa *lemang* menuju kampung pertama orang Semende di Desa Muara Dua. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama *Hantau Kendidai* untuk bersilaturahmi sembari berdoa memohon keselamatan. Ritual adat yang sudah berjalan ratusan tahun itu dikenal dengan *Pangku Paliare*.

Pangku Paliare berarti memangku dan memelihara. Itu dapat dimaknai dengan memangku dan memelihara diri, keluarga, maupun masyarakat umum. Ritual tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Masyarakat Adat Semende pada 10 Muharam.

Ansori, Kepala Desa Muara Dua, menyatakan bahwa ritual adat *Pangku Paliare* selalu ramai dihadiri oleh keturunan orang Semende. Ia menerangkan, ritual unik itu mewajibkan setiap generasi penerus Semende untuk hadir dengan membawa satu batang *lemang* yang terbuat dari beras ketan yang dimasukkan ke dalam bambu kecil. Ansori juga menyebut hal lain yang menarik dalam proses pembuatan *lemang*.

"Proses pembakaran *lemang* diserahkan kepada pihak perempuan sehari sebelum ritual dimulai," katanya di sela-sela kegiatan *Pangku Paliare* baru-baru ini.

Ansori melanjutkan, setiap *lemang* yang terkumpul akan dihitung jumlahnya. Ia menerangkan bahwa jika dicermati, proses penghitungan *lemang* persis dengan praktik pencatatan sensus penduduk yang kerap dilakukan pemerintah. Bedanya, kalau sensus penduduk yang dikumpulkan adalah data berupa nama, alamat, dan keluarga yang semuanya kemudian dicatatkan pada kertas atau komputer, sementara dalam *Pangku Paliare* tidak demikian. Kita hanya meminta *lemang* dari para keturunan Masyarakat Adat untuk dikumpulkan.

"Dengan demikian, tali keluarga di antara mereka tetap tertaut. Meski terpisah di banyak tempat, namun selalu terkumpul dalam satu ikatan *Pangku Paliare*," ungkapnya.

Ansori menyebut kalau pada perayaan ritual adat tahunan itu, *lemang* dapat terkumpul hingga lebih dari seribu batang. *Lemang-lemang* dikumpulkan dari berbagai kampung yang memiliki ikatan kuat dengan kampung Muara Dua yang dikenal dengan Kampung Tua.

Ritual adat *Pangku Paliare* dimulai dengan *besebut* atau sering juga dikenal dengan ratapan memanggil leluhur yang dilakukan oleh *malim* (ketua adat). Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan *Sahabat Empat* yang bermakna untuk mengetahui *Raja Empat* yang menjaga tanah leluhur dari Masyarakat Adat Semende Muara Dua Ulu Nasal. Setelah itu, ada pembacaan *Bebue Panjang* (sejarah panjang). Ansori menerangkan bahwa pembacaan *Bebue Panjang* itu biasanya turut menuturkan proses penciptaan semesta sampai ke hadirnya manusia.

"Pembacaan *Bebue Panjang* memiliki makna yang mendalam akan asal-usul serta jati diri manusia, baik kepada sesama makhluk hidup maupun kepada Tuhan," terangnya.

Ansori menjelaskan pula tentang adanya prosesi *Jampi Liarau* yang merupakan penutup *Pangku Paliare*. Air limau yang disiapkan pada acara itu akan didoakan oleh *malim*. Selanjutnya, air limau dibagikan kepada Masyarakat Adat yang hadir. Kami percaya itu sebagai pembawa keselamatan serta dapat menyembuhkan penyakit.

Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Kaur Agus Setiawan menyatakan senang melihat ritual adat *Pangku Paliare* masih lestari di tengah kehidupan Masyarakat Adat. Ia berharap ritual yang dilaksanakan setiap 10 Muharam itu bukan hanya saja sekadar acara seremonial, namun - yang lebih penting dari itu - memberikan edukasi kepada berbagai komunitas Masyarakat Adat di Muara Dua Nasal.

"Kampung ini dulunya mempunyai tata aturan dalam mengelola tanah, sungai, dan tata cara hidup bermasyarakat di kampung. Ritual adat *Pangku Paliare* ini bisa menjadi perlawanan dalam bentuk budaya kepada perusahaan-perusahaan yang sekarang mencaplok hutan desa maupun hutan adat yang ada di Muara Dua Nasal," kata Agus dengan penuh harap.



Ritual adat *Pangku Paliare*
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

* Penulis adalah jurnalis rakyat dari Kabupaten Kaur, Bengkulu.

Pariwisata Papua Berbenah untuk Kenyamanan Peserta KMAN VI

Oleh Nesta Makuba *

Pariwisata di Wilayah Adat Tabi, Papua terus berbenah jelang pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) yang akan dilaksanakan pada 24-30 Oktober 2022. Sejumlah potensi wisata dikembangkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Masyarakat Adat dari berbagai kampung demi menjaga kenyamanan para peserta dan tamu KMAN VI yang datang dari berbagai penjuru Nusantara dan belahan dunia lain.

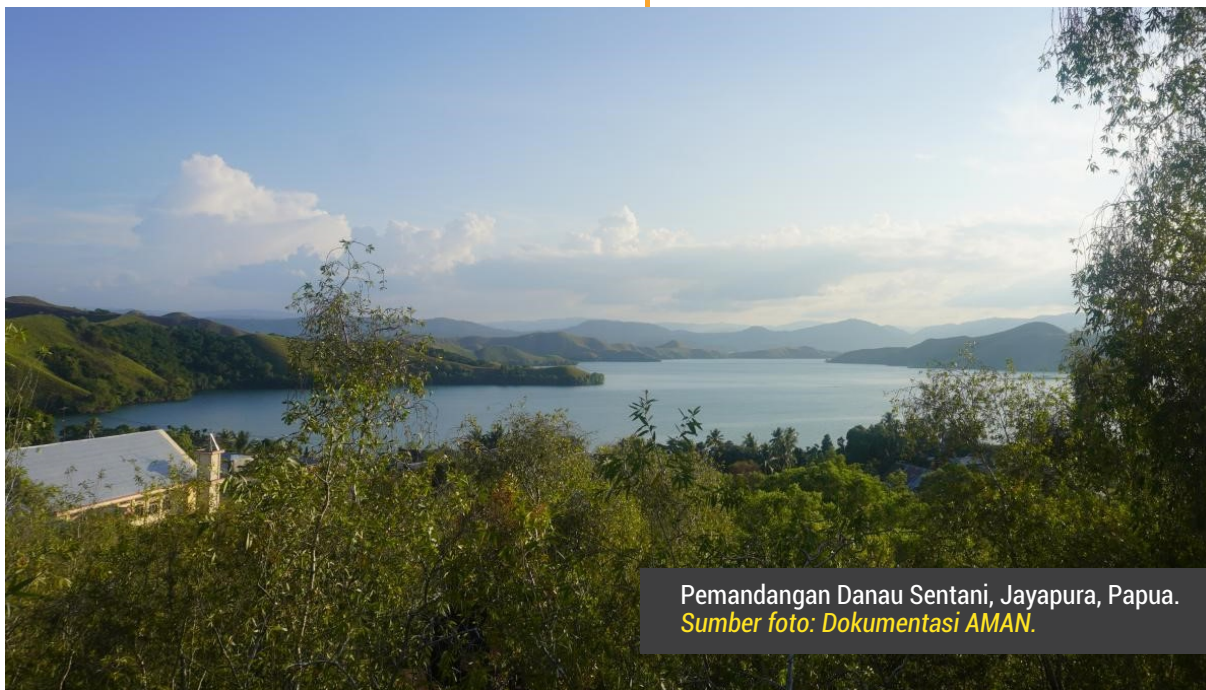
Tomi Sibi, Kepala Kampung Kayu Pulo, menyatakan bahwa Papua memiliki banyak lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Saat ini, Pemda bersama Masyarakat Adat sedang membenahi sarana dan prasarana pariwisata yang ada di kampung, termasuk Kampung Kayu Pulo.

"Wisata di sini sedang dibenahi. Kami berharap nanti peserta KMAN VI datang untuk menikmati indahnya wisata di Kampung Kayu Pulo. Tempatnya bagus," kata Tomi yang ditemui di kampungnya pada 12 September 2022.

Ia menjelaskan bahwa secara geografis, Kampung Kayu Pulo memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan, terutama pantai pasir putih. Wisata pantai di kampung mereka yang bersebelahan dengan pulau kosong itu, cocok untuk titik foto dengan pemandangan latar belakang Kota Jayapura. Tomi berharap wisata pantai yang ada di kampung, akan ramai dikunjungi peserta KMAN VI, sehingga memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat di kampung.

"Harapannya begitu, sehingga kegiatan KMAN VI nanti bisa mengangkat ekonomi Masyarakat Adat di kampung ini," kata Tomi.

Ia menerangkan Kampung Kayu Pulo baru-baru ini ditunjuk oleh panitia KMAN VI sebagai salah satu lokasi sarasehan KMAN VI. Dari 12 kampung yang ditunjuk panitia, dua di antaranya berada di Kota Jayapura, yaitu Kampung Kayu Pulo dan Kampung Enggros. Sementara, 10 kampung lainnya berada di Kabupaten Jayapura.



Pemandangan Danau Sentani, Jayapura, Papua.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

* Penulis adalah jurnalis Masyarakat Adat di Kota Jayapura, Papua.



Tomi menyatakan bahwa penunjukkan Kampung Kayu Pulo sebagai tempat sarasehan KMAN VI, akan memberikan peluang bagi kampung yang berpenduduk sekitar 624 jiwa itu untuk mempromosikan potensi wisata mereka. Untuk itu, katanya, Masyarakat Adat sangat mendukung kegiatan sarasehan yang dilaksanakan di kampung.

Ondoafi Kampung Tahima Soroma Kayu Pulo Nikolas Youwe juga mendukung kegiatan sarasehan yang akan dilaksanakan di Kampung Kayu Pulo. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat positif karena bisa mengangkat potensi pariwisata kampung lebih terekspos keluar, sehingga menjadi daya tarik sendiri. Nikolas yakin peserta KMAN VI akan puas dengan pemandangan indah yang akan mereka lihat di Kampung Kayu Pulo.

“Pariwisata di Kampung Kayu Pulo tidak akan mengecewakan. Peserta KMAN, jika kembali ke daerahnya, pasti akan cerita tentang keindahan Kampung Kayu Pulo,” ujarnya.

Panitia KMAN VI di Kota Jayapura, yaitu Evert Merauje, menyatakan bahwa secara tidak langsung, penunjukan Kampung Kayu Pulo dan Kampung Enggros sebagai lokasi sarasehan di Kota Jayapura, akan mempromosikan potensi wisata di kampung tersebut. Evert menambahkan, itu merupakan sebuah terobosan yang baik dalam menggali dan mengangkat pariwisata.

“Suatu saat, setelah kegiatan KMAN VI, dua kampung ini akan menjadi kampung wisata atau ekowisata. Kita akan mendorong kedua kampung ini akan lebih baik ke depannya,” kata Evert.

Sementara itu, di Kabupaten Jayapura, sejumlah situs sejarah yang ada di Kampung Nendali Netar akan diperkenalkan sebagai destinasi pariwisata pada pelaksanaan sarasehan KMAN VI.

Kepala Kampung Nendali Netar Wemfrid Wally mengakui ada sejumlah titik wisata dan tugu situs sejarah yang terdapat di Kampung Nendali Netar, akan dipromosikan kepada para peserta sarasehan KMAN VI. Tugu situs sejarah yang dipromosikan tersebut, meliputi Tugu Tifa, Tugu Helikopter, Tugu Salib, dan Tugu MacArthur di Ifar Gunung Sentani. Semua itu akan menjadi daya tarik wisata.

Saat ini, kata Wemfrid, sejumlah titik dan situs sejarah tersebut sedang ditata dan dibersihkan untuk menarik minat wisatawan. Sementara itu, akses untuk ke Tugu MacArthur juga sedang dibangun jalan alternatif supaya tidak mengganggu kompleks militer.

“Semuanya sedang ditata. Masyarakat Adat di sini sedang membenahi spot pariwisata agar terlihat menarik,” katanya.



Pemandangan Gunung Cyclops dari tepi Danau Sentani, Jayapura, Papua.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Kuliner Sagu “Huruwaka Yobe” Ikut Meramaikan KMAN VI

Oleh Aeron Ian Monim, Barsalina Y. Kreutha, Festus Demena, & Tri Yocku *

Koperasi Peran Serta Wanita atau Koperwan adalah sebuah usaha kecil yang hadir di tengah-tengah kampung untuk memandirikan perempuan adat di kampung dengan aneka olahan kue atau makanan kecil berbahan dasar sagu, termasuk kue kering, kue basah, keripik, es krim, dan lain-lain.

Sagu memiliki khasiat dan merupakan jati diri *Bhuyakha* (Sentani) maupun Papua secara umum. Bagi kami Masyarakat Adat di Sentani, sagu merupakan makanan pokok yang setiap hari kami makan. Kami juga mengolah sagu menjadi bermacam kuliner.

Makanan ringan berbahan sagu yang diproduksi dan dikelola oleh Koperasi Wanita Tani Huruwaka Yobe Provinsi Papua yang diketuai oleh Merlynn Tokoro, akan ikut meramaikan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI pada Oktober 2022 mendatang yang bertempat di Wilayah Adat Tabi, Jayapura.

Koperasi tersebut didirikan pada 2019 dan sudah beroperasi di 19 distrik di Kabupaten Jayapura. Koperasi bertempat di Kampung Yahim, Dobonsolo, Kabupaten Jayapura dan telah diresmikan rumah produksinya pada 19 Agustus 2022.



Aneka kuliner berbahan sagu.
Sumber foto: Tim jurnalis rakyat Papua.

* Para penulis adalah jurnalis rakyat dari Masyarakat Adat di Jayapura, Papua.



Kuliner sagu yang diproduksi koperasi itu bukan hanya menyajikan cita rasa khas Papua, tapi juga dikembangkan dengan berbagai rasa.

Dalam wawancara kami bersama anggota Koperasi Wanita Tani Huruwaka Yobe, yaitu Tri Yoku, menerangkan bahwa sampai saat ini kuliner sagu sudah diolah menjadi berbagai jenis kue, antara lain kue kering ulat sagu, kembang goyang, biskuit, dan es krim. Varian rasa kuliner sagu yang kini diproduksi, antara lain kacang, cokelat, pandan, dan keju.

Seluruh makanan kecil yang diproduksi itu, tidak menggunakan bahan pengawet buatan. Namun, kue-kue kering tersebut dapat disimpan selama sekitar dua bulan.

Dalam pembuatannya, bermacam kue tersebut disesuaikan dengan pesanan dan juga harga bahan dasarnya, yaitu sagu.

Kuliner kue Huruwaka pun bisa dijadikan oleh-oleh atau buah tangan ketika ada pengunjung yang hendak membawanya pulang saat KMAN VI.

Kami berpesan kepada pemerintah di level provinsi, kabupaten, maupun kampung agar hutan sagu tetap dilestarikan, sehingga persediaan makanan pokok tetap terjaga sebagai budaya orang Papua dengan bermacam kegunaan dan manfaat dari pohon sagu. Bagi kami, sagu juga telah menjadi penunjang ekonomi Masyarakat Adat, khususnya yang berada di kampung, ucap Marlin Tokoro ketika kami ajak mengobrol melalui telepon pada 23 Agustus 2022.



Kue ulat sagu.
Sumber foto: Tim jurnalis rakyat Papua.



Kesiapan Masyarakat Adat di Jayapura Menyambut KMAN VI

Oleh Tim Infokom

Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura, Papua, kian diliputi semangat dan antusiasme untuk menjadi tuan rumah Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN VI yang akan diselenggarakan di Wilayah Adat Tabi pada 24-30 Oktober 2022. Berbagai persiapan telah hampir rampung di kampung-kampung dalam menerima para peserta maupun tamu yang tak lain adalah sesama saudara Masyarakat Adat yang datang dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan belahan dunia lain.

"Ibu-ibu di sini, siap sambut peserta KMAN VI," ucap Mama Rode, seorang pimpinan kelompok tari di Kampung Atamali. Ia menegaskan, "Semua su (sudah) siap! Kami akan dansa dengan *tifa* nanti." *Tifa* adalah alat musik tradisional menyerupai kendang yang umum ada di Tanah Papua.

Kampung Atamali direncanakan akan menjadi tempat tinggal bagi peserta KMAN VI. Di sana, warga telah menyiapkan rumah-rumah besar yang dapat ditinggali oleh sekitar 20 sampai 30 orang.

Pada 25 Agustus lalu, Tim Infokom melakukan kunjungan ke Kampung Atamali dan kampung-kampung lain yang mendiami tepian dan pulau-pulau mungil di Danau Sentani yang berada di lereng Pegunungan *Dobonsolo* atau *Robhong Holo (Cyclops)*. Selain memperluas kabar gembira perihal kesiapan kampung-kampung Masyarakat Adat, kami pun hendak berbagi potret keindahan dan keramahan Masyarakat Adat di kawasan yang kerap dimaknai sebagai tempat tinggal yang damai.

Pembuatan perahu kayu di Kampung Atamali.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

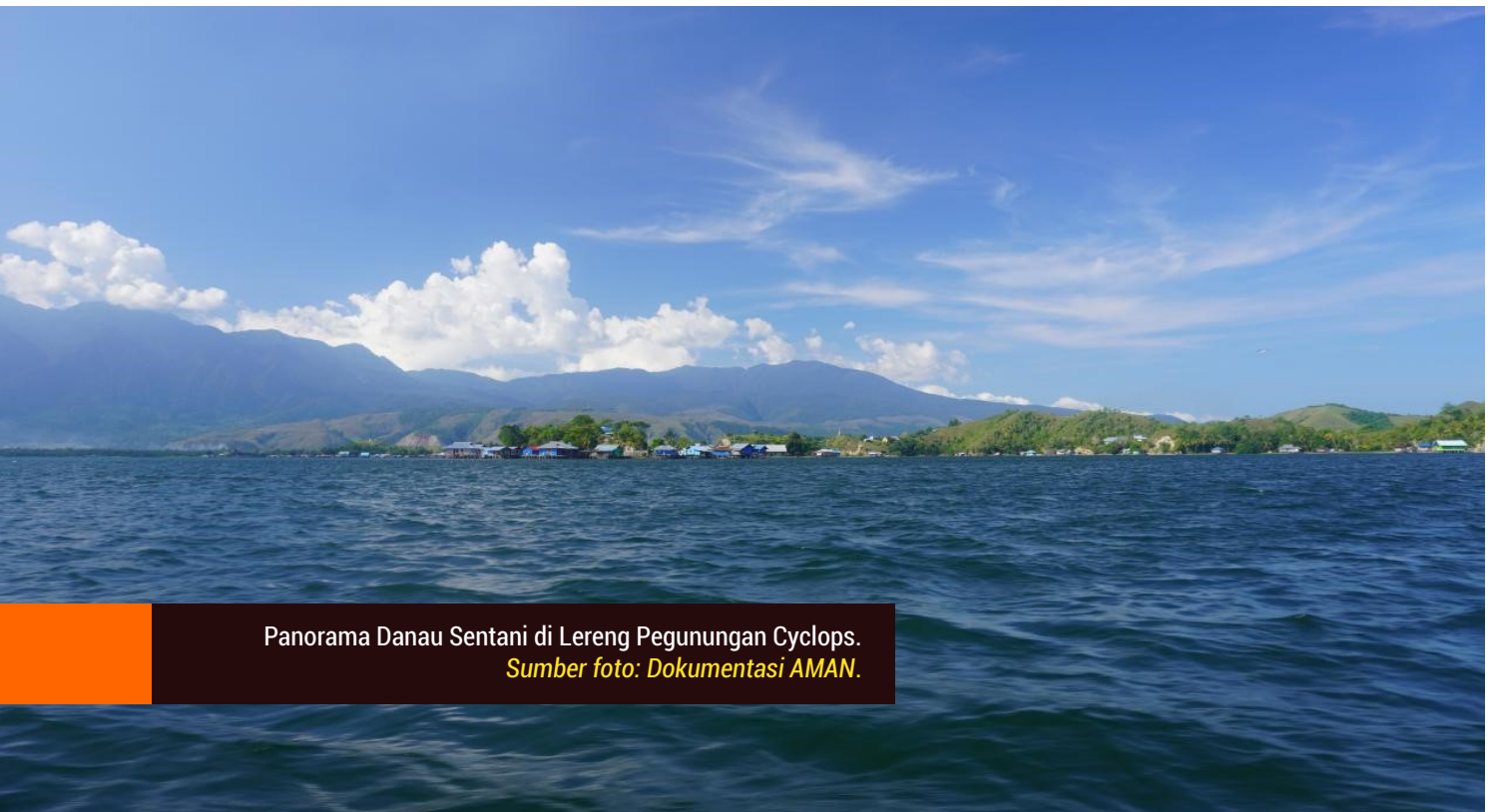




Lanskap Kampung Atamali.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Panorama Danau Sentani di Lereng Pegunungan Cyclops.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Mama-mama di Kampung Atamali sedang berkumpul di dapur untuk membuat roti dan berbincang tentang kesiapan kampung menjelang KMAN VI.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Menangkap ikan adalah keseharian Masyarakat Adat di sekitar Danau Sentani, khususnya di Kampung Abar yang hampir seluruh warganya adalah nelayan.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Sajian ikan mujair bakar dari Danau Sentani di Kampung Hobong.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Para anak adat sekaligus penari cilik dari Kampung Hobong yang tengah bersiap mementaskan tarian sambutan untuk KMAN VI.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Kampung Yoboi yang dihiasi cat warna-warni.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Hutan sagu di Kampung Yoboi sebagai bentuk penegasan kedaulatan pangan Masyarakat Adat di Papua.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Transparansi Publik

Laporan Iuran Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) per 31 Agustus 2022

Deskripsi	Jumlah
Iuran Anggota Komunitas	1.460.000
Komunitas Laman Riam Dadap Ketapang Tengah	120.000
Komunitas Laman Sekukun Ketapang Tengah	120.000
Komunitas NN	120.000
Komunitas Montongbaan	500.000
Komunitas Penyang	120.000
Komunitas Kenabung Ketapang Tengah	120.000
Komunitas Congkong Baru Ketapang Tengah	120.000
Komunitas Menyumbang Ketapang Tengah	120.000
Komunitas Sepanggung Botung Keramat Singa Piting	120.000
Sumbangan	500.000
Sumbangan NN	500.000
Total	1.960.000





Laporan Keuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) per 31 Agustus 2022

Penerimaan Dana Terikat per 31 Agustus 2022

Sumber Dana	Penerimaan	Sisa
Tenure Facility	23.480.000.000	8.687.324.138
Ford Foundation	25.522.507.481	-
Tamalpais	5.729.882.875	-
CLUA	4.162.361.250	-
IPLC	3.254.393.450	2.166.261.150
PACKARD	2.084.763.700	-
HIVOS	871.843.974	-
NIA TERO Foundation	2.919.318.900	-
Rainforest Foundation US - GATC	252.149.700	252.149.700
IFAD	3.191.600.000	2.095.421.220
IWGIA	255.150.000	240.166.250
Pawanka-Wayfinder	1.382.532.600	-
NICFI	9.313.505.729	-
SKOLL	5.020.750.000	2.724.815.178
NDI	1.037.068.300	790.829.416
KMAN VI	1.576.250.000	1.576.585.050
Saldo	90.054.077.960	18.533.552.104

Penerimaan Dana Tidak Terikat per 31 Agustus 2022

Sumber Dana	Jumlah
Dana iuran kader dan komunitas Anggota AMAN	116.260.234
Donasi (Penggalangan Dana Mandiri)	60.496.734



Laporan Keuangan
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
per 31 Agustus 2022

Penerimaan Dana Emergency Respond	
Sumber Dana	Jumlah
Ashden Trust (ER)	875.513.500
AVAAZ Foundation (ER)	1.061.037.750
Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376
Pawanka (ER)	694.346.700
Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750
Tamalpais Trust	1.471.605.450
Samdhana (ER)	43.500.000
Packard (ER)	5.659.759.450
Dana-dana Program ER	8.716.875
Sisa dana ER per 31 Agustus 2022	2.707.704.034

Dana Organisasi per 31 Agustus 2022	
Sumber Dana	Jumlah
Kas	10.000.000
Dana Organisasi	50.307.836
Dana Resiliancy	3.542.207.512
Saldo	3.602.515.348
Titipan dana Program-program	1.134.072.425





Laporan Keuangan Tanggap Darurat/ Emergency Respond (ER) AMAN per 31 Agustus 2022

<i>Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019</i>		<i>504.184.783</i>
Penerimaan	Sumber Dana	Jumlah
20-Apr-2020	Tamalpais Trust Fund	764.770.500
4-Mei-2020	Pawanka Foundation	439.280.250
23-Jun-2020	Tebtebba	209.040.750
10-Jul-2020	AVAAZ Foundation	1.061.037.750
18-Sep-2020	RFN	712.892.376
27-Okt-2020	IFAD	33.960.000
16-Des-2020	Ashden Trust	101.953.500
24-Feb-2021	Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875
12-Apr-2021	CLUA	68.122.729
27-Jul-2021	SAMDHANA	43.500.000
13-Agu-2021	Tamalpais Trust Fund	706.834.950
25-Agu-2021	Ashden Trust	773.560.000
10-Sep-2021	CLUA	52.968.750
22-Okt-2021	Pawanka Foundation	694.346.700
8-Nov-2021	Packard	5.659.759.450
29-Jun-2022	Skoll	171.250.000
5-Jul-2022	Pawanka Wayfinder	17.733.315
Total Dana ER AMAN		12.023.912.678
Pengeluaran per 31 Agustus 2022		9.316.208.643
Sisa dana menurut bank Per 31 Agustus 2022		2.707.704.034

Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan-dukungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain





Menuju Transformasi CU Randu

Oleh Efrial Ruliandi Silalahi *

Dalam diskusi yang dilakukan oleh *Credit Union Pancoran Kehidupan (CU Randu)* pada akhir Juli 2022 lalu bersama perwakilan dari AMAN dan sejumlah pakar *credit union*, antara lain Stefanus Masiun, Antonius Antong, dan Antonius Anyu dari Kalimantan Barat serta Ambu Naptamis dari Kalimantan Tengah, dilahirkan suatu kesimpulan bahwa CU Randu akan memulai pengorganisasian di tingkat komunitas Masyarakat Adat. Pada jangka panjang, CU Randu perlu membangun konsep yang realistis dan tepat guna. Maka, menjadi penting untuk menyamakan persepsi di tingkat komunitas Masyarakat Adat untuk menitipkan uang bersama pada seseorang yang dimandatkan. Tujuan komunitas Masyarakat Adat menghimpun dana atau menabung, salah satunya adalah untuk membangun modal produktif, penggalangan dana mandiri untuk keberangkatan menuju Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) di Wilayah Adat Tabi di Papua, dan lain-lain.

CU Randu merasa perlu melakukan terobosan dan inovasi yang berbasis komunitas Masyarakat Adat. Cara mewujudkannya yakni dengan mendorong gagasan bahwa setiap komunitas Masyarakat Adat perlu mempunyai dana mandiri yang dikelola melalui CU Randu. Tentu saja, dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk menyusun rencana itu. Misalnya, setiap komunitas Masyarakat Adat menjadi anggota CU Randu, kemudian komunitas Masyarakat Adat dapat menunjuk kepala adat atau perwakilan yang dipilih atau disepakati untuk menjadi wakil atau pengampu.

Dalam konteks KMAN VI misalnya, bisa saja setiap komunitas Masyarakat Adat memerlukan dana sebesar Rp. 20 juta yang dapat diangsur selama lima tahun atau hingga selesai. Pada prinsipnya, setiap komunitas Masyarakat Adat memiliki kemampuan dan harus melakukan terlebih dulu musyawarah mufakat. Pada praktiknya, masing-masing komunitas Masyarakat Adat memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam menanggung angsuran tersebut atas nama komunitas Masyarakat Adat.

Kampung Yoboi di tengah Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua yang menjadi bagian dari Wilayah Adat Tabi.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





CU Randu pun perlu membangun arus pemikiran yang holistik dengan perpaduan kekuatan individual dan kelompok (kolektif). Misalnya, dalam membangun infrastruktur, seperti sistem irigasi pertanian, pembangunan balai adat, dan lain-lain, perlu ada penekanan pada tujuan bersama atas nama komunitas Masyarakat Adat. Harapannya adalah agar komunitas Masyarakat Adat bergabung menjadi anggota.

Kerja-kerja yang perlu diorganisasikan dalam waktu dekat, meliputi pembangunan simpanan kelompok dan dana kemandirian ekonomi dalam komunitas Masyarakat Adat. Selain dapat membangun usaha kolektif, keuntungan dari itu juga dapat meningkatkan tabungan kolektif.

Sebagai bagian dari proses transformasi, CU Randu akan membuat kertas kerja yang praktis dan mengacu pada pembelajaran yang telah dialami beragam *credit union* besar, tentunya dengan tidak meninggalkan kekhasan CU Randu sendiri sebagai lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya melalui berbagai inovasi yang fleksibel dan keutamaan manfaat bagi banyak orang, terutama Masyarakat Adat.



Perempuan Adat Mollo sedang memintal benang & membuat kain tenun.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

* Penulis adalah staf manajemen dari CU Randu.



CALON-CALON SEKRETARIS JENDERAL ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Rukka Sombolinggi

Asal Komunitas Masyarakat Adat:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Nanggala | 6. Mengkendek |
| 2. Madandan | 7. Tondon |
| 3. Sangala' | 8. Buntao' |
| 4. Kesu' | 9. Rantebua |
| 5. Makale | 10. Palesan |
| 6. Mengkendek | |

Toraya, Sulawesi Selatan

CALON
SEKJEN
AMAN





Mina Setra

Asal Komunitas
Masyarakat Adat:

Penyelimau Hulu,
Dayak Pompakng

Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat

CALON
SEKJEN
AMAN



Eustobio Rero Renggi

Asal Komunitas
Masyarakat Adat:

Nduaria

Kabupaten Ende,
Nusa Tenggara Timur

CALON
SEKJEN
AMAN



Abdi Akbar

Asal Komunitas
Masyarakat Adat:

1. Omboan
2. Uri'

Rongkong,
Kabupaten Luwu Utara,
Sulawesi Selatan

CALON
SEKJEN
AMAN





Arifin Saleh

Asal Komunitas Masyarakat Adat:

1. Rakyat Penunggu Kampong Medan Area
2. Rakyat Penunggu Kampong Baru
3. Rakyat Penunggu Kampong Bandar Klippa

Deli / Kota Medan
Sumatera Timur

CALON
SEKJEN
AMAN



Erasmus Cahyadi

Asal Komunitas
Masyarakat Adat:

Tere

Kabupaten Manggarai,
Nusa Tenggara Timur

CALON
SEKJEN
AMAN



Deff Tri

Asal Komunitas
Masyarakat Adat:

Serawai

Kabupaten Seluma,
Bengkulu

CALON
SEKJEN
AMAN





Sardi Razak

Asal Komunitas
Masyarakat Adat:
Cendreanging

Kabupaten Sidrap,
Sulawesi Selatan

CALON
SEKJEN
AMAN



Rukmini Toheke

Asal Komunitas
Masyarakat Adat:
Ngata Toro

Kabupaten Sigi,
Sulawesi Tengah

CALON
SEKJEN
AMAN



Riky Aprizal

Asal Komunitas
Masyarakat Adat:

Serawai

Kabupaten Seluma,
Bengkulu

CALON
SEKJEN
AMAN





NUSANTARA INDIGENOUS COFFEE



NIC mempersembahkan kopi-kopi dari para petani adat Nusantara bagi kamu pecinta kafein. Petani-petani smallholder ini tersebar di NTT, Sulsel, Bali, dan Bengkulu, dan akan menyuntikkan semangat dalam secangkir kopi di pagi dan sore harimu.

Kami menyediakan full-washed Arabica dan Robusta green bean, roasted bean, maupun ground coffee yang sesuai dengan kesukaanmu. Kami juga bekerja sama dengan kakak kandung Gerai Nusantara dalam menyediakan goodie bag untuk kebutuhan event kamu dengan sistem PO dan harga terjangkau. Jangan ragu menghubungi kami untuk info tentang paket-paket yang kami punya.

Untuk berbelanja dengan nyaman, silakan kunjungi laman marketplace dan Instagram kami untuk lineup kopi-kopi yang tersedia. Atau, kontak kami untuk menikmati cerita-cerita kopi di kedai kami di Gerai Nusantara Bogor.

Dukung terus produk Masyarakat Adat Nusantara ya!

find us

Kedai: Jl. Jend. Sudirman No.15F, RT.01/RW.03, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (on appointment only)

 [indigenous_coffee](https://www.instagram.com/indigenous_coffee)

 085817808958 – Aji

 [indigenous_coffee](https://www.facebook.com/indigenous_coffee)

 [indigenouscoffee](https://www.tiktok.com/@indigenouscoffee)